GAGASAN KEDAULATAN RAKYAT MENURUT MOHAMMAD HATTA

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Syari'ah (S.Sy) Pada Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten



Oleh:

SANTI SITI NURHAYATI

NIM: 111200186

FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
"SULTAN MAULANA HASANUDDIN" BANTEN
2016 M/1437 H

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis sebagai salah satu

syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam dan diajukan pada Jurusan

Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah Isntitut Agama Islam Negeri Sultan Maulana

Hasanuddin Banten ini sepenuhnya asli merupakan karya tulis ilmiyah saya pribadi.

Adapun tulisan maupun pendapat orang lain yang terdapat dalam skripsi ini

telah saya sebutkan kutipannya secara jelas sesuai dengan etika keilmuan yang

berlaku di bidang penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa sebagian atau seluruh isi skripsi ini

merupakan hasil perbuatan plagiarisme atau mencontek karya tulisan orang lain, saya

bersedia untuk menerima sanksi berupa pencabutan gelar kesarjanaan yang saya

terima atau sanksi akademik lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Serang, 25 April 2016

SANTI SITI NURHAYATI

NIM: 111200186

ABSTRAK

Nama: Santi Siti Nurhayati, NIM: 111200186, Program Studi: Hukum Tata Negara (Siyasah), Judul Skripsi: Gagasan Kedaulatan Rakyat Menurut Mohammad Hatta.

Kedaulatan rakyat adalah kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat atau juga dapat disebut pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat, baik secara langsung maupun tidak, rakyat berkuasa atau berdaulat penuh atas negara. Mohammad Hatta adalah salah satu pemikir *founding father* (Bapak pendiri) bangsa Indonesia. Pemikirannya sangat *brilliant* (cerdas), mengandung ide-ide besar dan mencakup detail dalam praktiknya. Ia merupakan intelektual yang tumbuh berkembang di lingkungan religius dan barat yaitu di surau milik pak gaeknya karena ia belajar mengaji di sana dan juga ia melanjutkan kuliah di Belanda.

Pada penulisan skripsi ini mengangkat permasalahan antara lain: 1). Bagaimana gagasan kedaulatan rakyat menurut Mohammad Hatta?, 2). Bagaimana relevansi konsep kedaulatan rakyat Mohammad Hatta dengan demokrasi dalam konteks negara Indonesia?.

Tujuan dalam penelitiaan ini adalah: 1). Untuk mengetahui gagasan kedaulatan rakyat Mohammad Hatta, 2). Untuk mengetahui relevansi konsep kedaulatan rakyat Mohammad Hatta dengan demokrasi dalam konteks negara Indonesia.

Penelitian skripsi ini penulis menggunakan penelitian kepustakaan (library research), yaitu suatu jenis penelitian yang sumber datanya diperoleh melalui penelitian terhadap buku-buku, maupun karya tulis lain yang berhubungan dengan persoalan yang diteliti atau dibahas. Termasuk data-data sejarah yang diperlukan.

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah: 1). Gagasan kedaulatan rakyat yang ingin dikembangkan oleh Mohammad Hatta adalah demokrasi yang bercorak politik dan ekonomi sekaligus, dimana keduanya berada diantara paham individualisme dan kolektivisme yang berasal dari sosial politik masyarakat asli Indonesia, 2). Relevansi kedaulatan rakyat Mohammad Hatta dengan demokrasi dalam konteks negara Indonesia adalah kedaulatan rakyat Mohammad Hatta sebagai dasar daripada demokrasi Indonesia yang tertuang dalam UUD 1945.



KEMENTERIAN AGAMA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI "SULTAN MAULANA HASANUDDIN" BANTEN FAKULTAS SYARIAH

Jl. Jend. Sudirman No. 30 Serang 42118 Telp. 0254-2000323 Fax. 0254-200022 e-mail: iainbanten@yahoo.com

Nomor : Nota Dinas Kepada Yth.

Lampiran : 1 (satu) Eksemplar **Dekan Fakultas Syariah**Hal : **Usulan Munaqasyah IAIN "SMH" Banten**

a.n. Santi Siti Nurhayati

NIM. 111200186 di –

Serang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dipermaklumkan dengan hormat bahwa setelah membaca, dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa Skripsi Saudari Santi Siti Nurhayati, NIM. 111200186 dengan judul Skripsi "Gagasan Kedaulatan Rakyat Menurut Mohammad Hatta", kiranya dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk melengkapi Ujian Munaqasyah pada Fakultas Syari'ah Jurusan Hukum Tata Negara IAIN "Sultan Maulana Hasanuddin" Banten. Maka kami ajukan skripsi ini dengan harapan dapat segera di munaqasyahkan.

Demikian, atas perhatian bapak, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Serang, 25 April 2016

Pembimbing I Pembimbing II

PERSETUJUAN

GAGASAN KEDAULATAN RAKYAT MENURUT MOHAMMAD HATTA

Oleh:

SANTI SITI NURHAYATI 111200186

Menyetujui,

Pembimbing I

Pembimbing II

<u>Dr. H. Ahmad Zaini, S.H., M.Si</u> NIP: 19650607 199203 1 005

<u>Dr. H. E. Zaenal Muttaqin, M.A., M.H.</u> NIP: 19840802 201101 1 008

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah Ketua Jurusan Hukum Tata Negara

 Dr. H. Yusuf Somawinata, M.Ag
 Dr. H. Muhammad Ishom, M.A

 NIP: 19591119 199103 1 003
 NIP: 19760623 200604 4 1002

PENGESAHAN

Skripsi a.n. Santi Siti Nurhayati, NIM: 111200186 yang berjudul: "Gagasan Kedaulatan Rakyat Menurut Mohammad Hatta", telah diujikan dalam sidang Munaqasyah Institut Agama Islam Negeri "Sultan Maulana Hasanuddin" Banten pada tanggal 25 April 2016, Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Program Strata Satu (S1) pada Fakultas Syari'ah Jurusan Hukum Tata Negara Institut Agama Islam Negeri "Sultan Maulana Hasanuddin" Banten.

Sidang Munaqosyah,

Ketua Merangkap Anggota

Sekretaris Merangkap Anggota

<u>Dr. H. Muhammad Ishom, M.A</u> NIP: 19760623 200604 4 1002 <u>H. Ade Mulyan, S.Ag., M.Si</u> NIP: 19591104 199403 1 002

Anggota-Anggota,

Penguji I

Penguji II

Prof. Dr. H.B. Syafuri, M.Hum NIP. 19590810 199003 1 002

M. Zainor Ridho M.Si NIP. 19800721 200912 1 005

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. H. Ahmad Zaini, S.H., M.Si NIP: 19650607 199203 1 005 <u>Dr. H. E. Zaenal Muttaqin, M.A., M.H.</u> NIP: 19840802 201101 1 008

Persembahan

Penulis persembahkan skripsi ini untuk kedua orang tua Suryana dan N. Sumiati. Terima kasih atas kasih sayang yang telah diberikan. Sungguh tak akan ada kasih sayang semurni kasih sayang dari mamah dan papah

MOTTO

وَٱلَّذِينَ ٱسۡتَجَابُواْ لِرَبِّم وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيۡنَهُمۡ وَمِمَّا رَزَقَنَاهُمۡ يُنفِعُونَ اللَّهُمُ اللَّاللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللّهُمُ اللَّهُمُ اللَّاللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللّهُمُ اللَّهُمُ اللَّالِمُ اللَّهُمُ الللَّهُمُ اللَّالِمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ

"dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang Kami berikan kepada mereka." (QS. Asy Syuura:38)

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama lengkap Santi Siti Nurhayati, dilahirkan di Pandeglang, Banten pada tanggal 09 November 1992, merupakan anak ke empat dari empat bersaudara berasal dari pasangan Bapak Suryana dan Ibu N. Sumiati.

Jenjang Pendidikan formal yang penulis tempuh adalah SDN Citumenggung 2 di Kampung Cimanggu, Kelurahan Citumenggung, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pandeglang lulus tahun 2005, dan SMP Negeri 1 Bojong lulus tahun 2009, setelah itu melanjutkan ke SMA Negeri 8 Pandeglang lulus tahun 2011, kemudian melanjutkan kuliah di IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten mengambil Jurusan Hukum Tata Negara pada Fakultas Syari'ah.

Selama menjadi mahasiswa penulis aktif di organisasi Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) HTN tahun 2012, sebagai anggota bidang internal.

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya yang telah diberikana hanya dengan izin-Nya lah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, shalawat beserta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita nabi Muhammad SAW.

Dengan pertolongan Allah dan usaha yang bersungguh-sungguh akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Gagasan Kedaulatan Rakyat Menurut Mohammad Hatta". Dalam penyusunan skripsi ini penulis memiliki kesulitan karena kurangnya pengetahuan, namun penulis bersyukur semua kesulitan tersebut dapat diatasi, karena adanya bantuan dari berbagai pihak, maka dari itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

- Bapak Prof. DR. H. Fauzul Iman, M.A., Rektor Institut Agama Islam Negeri "Sultan Maulana Hasanuddin" Banten, yang telah mengelola dan mengembangkan Institut Agama Islam Negeri "Sultan Maulana Hasanuddin" Banten.
- 2. Bapak Dr. H. Yusuf Somawinata, M.Ag., Dekan Fakultas Syari'ah IAIN "Sultan Maulana Hasanuddin" Banten, yang telah membantu proses menyelesaikan skripsi ini.
- 3. Bapak Dr. H. Muhammad Ishom, M.A, Ketua Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah IAIN "Sultan Maulana Hasanuddin" Banten.
- 4. Bapak Dr. H. Ahmad Zaini, S.H.,M.Si., Dosen Pembimbing I, dan Bapak Dr. H. E. Zaenal Muttaqin, M.A.,M.H., Dosen pembimbing II, yang telah memberikan arahan, bantuan serta dorongan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
- 5. Bapak dan Ibu dosen IAIN "SMH" Banten yang telah memberikan bekal pengetahuan yang begitu berharga kepada penulis.
- 6. Kepada kakak-kakak Danny Priyadi dan Risman Hudaya serta tak lupa kepada saudara kembar penulis Yanti Siti Nurjanah yang telah memberikan motivasi

semangat dan juga materi dalam penulisan skripsi, dari awal penulisan skripsi ini hingga akhir.

- 7. Teman-teman kostan FH 41 yang telah memberikan motivasi dan dukungan semangat.
- 8. Teman-teman HTN B 2011 seperjuangan yang selalu memberikan semangat.

Demikian skripsi ini penulis buat namun penulis menyadari, bahwa sebagai manusia yang memiliki keterbatasan, tentu hasil penulisan ini tidak lepas dari kekurangan dan kesalahan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua pembaca untuk perbaikan dimasa yang akan datang. Mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi pembaca.

Akhirnya hanya doa kepada Allah SWT yang penulis panjatkan semoga amal baik mereka diterima oleh Allah SWT., serta mendapatkan balasan yang berlipat ganda atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan kepada penulis.

Serang, 25 April 2016 Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANGAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

A.	Latar Belakang Masalah1	
В.	Rumusan Masalah	
C.	Tujuan Penelitian	
D.	Manfaat Penelitian7	
E.	Kerangka Penelitian8	
F.	Metode Penelitian	
G.	Sistematika Pembahasan	
BAB II BUNGA RAMPAI PEMIKIRAN MOHAMMAD HATTA		
A.	Biografi dan karya Mohammad Hatta14	
В.	Sosiohistoris pemikiran Mohammad Hatta	
BAB III TINJAUAN KEDAULATAN RAKYAT SECARA UMUM		
A.	Teori kedaulatan rakyat55	
B.	Pengertian kedaulatan rakyat65	
BAB	IV ANALISIS GAGASAN MOHAMMAD HATTA MENGENAI	

KEDAULATAN RAKYAT

A. Gagasan kedaulatan rakyat Mohammad Hatta	67		
B. Relevansi konsep kedaulatan rakyat Mohammad Hatta dengan de	emokrasi		
dalam konteks negara Indonesia	80		
BAB V PENUTUP			
A. Kesimpulan	87		
B. Saran-saran	88		
DAFTAR PUSTAKA			

BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lahirnya negara yang bernama Indonesia tidak luput dari peran serta para pejuang atau para pahlawan. Mereka semua menyumbangkan harta, tenaga dan pikiran sepenuhnya untuk mewujudkan cita-cita bersama yaitu demi terwujudnya negara Indonesia yang berdaulat dan merdeka, baik itu berdaulat dari sisi ekonomi, juga berdaulat dari sisi politik.

Dalam negara yang menganut paham demokrasi, rakyat memiliki kedaulatan tertinggi. Kedaulatan rakyat adalah kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat atau juga dapat disebut pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. ¹ Kedaulatan rakyat sendiri dapat diartikan sebagai bagian dari istilah demokrasi.

Dalam pandangan J.J Rousseaou, kedaulatan rakyat mengimplikasikan dua anggapan. *Pertama*, penolakkan terhadap segala wewenang di atas rakyat yang tidak dari rakyat. *Kedua*, tuntutan, agar segala kekuasaan yang ada mesti identik dengan kekuasaan rakyat. Jadi negara tidak berhak untuk meletakkan kewajiban atau pembatasan apapun pada rakyat. Rakyat berwenang penuh untuk menentukan dirinya

1

¹ Ni'matul Huda, *Ilmu Negara*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2013), h. 189.

sendiri, maka tidak ada pihak apapun yang mempunyai wewenang terhadap rakyat.²

Pada masa kini, demokrasi digadang-gadang merupakan sistem yang ideal dalam sebuah negara. Pada dasarnya demokrasi sendiri mempunyai arti penting dalam suatu negara yang menganut sistem demokrasi, seperti Indonesia. Menurut Joseph Schumpeter, demokrasi dapat dimaknai dalam dua pengertian, yang pertama adalah demokrasi sebagai kehendak rakyat sesuai dengan kedaulatan ditangan rakyat.³ Sudah barang tentu demokrasi akan berwujud manakala kehendak rakyat mayoritas dapat dipenuhi oleh pemerintah berkuasa dengan relatif baik. Karena itu pengertian ini sebenarnya hendak mengutarakan dari mana sumber demokrasi itu berasal, atau lebih konkretnya adalah dari mana sumber kekuasaan itu berada. Sumber kekuasaan dapat berada dari sesuatu yang adil kodrati atau kekuasaan yang dapat berasal dari legitimasi tradisional yang melekat pada suatu klan, dan seterusnya. Tetapi dalam konteks demokrasi, kekuasaan berasal dari rakyat. Ini artinya kekuasaan serampangan oleh penguasa, maka bukan tidak mungkin otoritas yang berasal dimandatkan pada pemerintah berkuasa ditarik kembali oleh pemilik kedaulatan yang sejati, yaitu: rakyat itu sendiri.

Kedua, demokrasi adalah sebagai kebaikan bersama. Merujuk pada ide awal pembentukan negara dikatakan bahwa kebaikan bersama merupakan ujung dari

² Ni'matul Huda, *Ilmu Negara*,..., h. 43.

³ Suryo Sakti Hadiwijoyo, *Negara, Demokrasi Dan Civil Society* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), h. 33.

kehendak bersama kolektif warga masyarakat.⁴ Karena itu, tujuan sistem pemerintahan demokrasi ialah menciptakan kebaikan bersama yang ditetapkan dalam kontrak politik. Jalan menuju hal tersebut tentu saja dengan metode demokratis dimana di dalamnya terdapat mekanisme kelembagaan yang mana penempatan individu dalam memperoleh kekuasaan untuk membuat keputusan melalui perjuangan kompetitif demokratis dalam rangka merengkuh suara-suara warga.

Dalam arti lain, demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan dalam suatu negara dimana semua warga negara memiliki hak, kewajiban, kedudukan dan kekuasaan yang baik dalam menjalankan kehidupannya maupun dalam berpartisipasi terhadap kekuasaan negara, dimana rakyat berhak untuk ikut serta dalam menjalankan negara atau mengawasi jalannya kekuasaan negara, baik secara langsung misalnya melalui ruang-ruang publik maupun melalui wakil-wakilnya yang telah dipilih secara adil dan jujur dengan pemerintahan yang dijalankan semata-mata untuk kepentingan rakyat, sehingga sistem pemerintahan dalam negara tersebut berasal dari rakyat, dijalankan oleh rakyat, untuk kepentingan rakyat.⁵

Karena demokrasi dengan berbagai pernik-perniknya berupa pelaksanaan konsep perwakilan, partisipasi rakyat dalam pemerintahan, pelaksanaan penegakan hukum, perlindungan hak asasi manusia, pelaksanaan kesejahteraan rakyat, konsep berkeadilan dalam pemerintahan, dan sebagainya, telah menjadi kebutuhan

⁴ Suryo Sakti Hadiwijoyo, Negara, Demokrasi Dan Civil Society,..., h. 34.

⁵ Munir Fuady, Konsep Negara Demokrasi (Bandung: PT. Refika Aditama, 2010), h. 2.

masyarakat secara universal, maka dapat dipastikan bahwa demokrasi dengan berbagai konsepnya itu akan selalu mendominasi kehidupan bernegara bagi masyarakat. Tidak ada alternatif lain, bahkan tidak ada lawan tanding yang seimbang. Kekokohan dan kelanggengan kebutuhan akan negara demokrasi ini sudah menyatu dengan alam pikir manusia, sebab prinsip-prinsip demokrasi tersebut sebenarnya berasal dari apa yang disebut dengan konsep moralitas dan hukum alam, yaitu hukum yang berlaku dimana saja dan kapan saja. Karena demokrasi sudah menjadi standar moral secara alamiah, maka sampai kapan pun untuk jangka panjang.⁶

Akan tetapi, fakta yang terjadi saat ini ialah rakyat tidak lagi memiliki ruang yang luas untuk berdaulat, jika tiap-tiap golongan boleh mengambil keputusan sesuka-sukanya atas nama kedaulatan rakyat, jikalau keputusan itu satu sama lain tidak cocok, bahkan bertentangan. Dari berbagai interaksi dalam masyarakat yang seringkali terjadi dengan gesekan-gesekan yang cukup tinggi tersebut, demokrasi haruslah selalu dapat mencari solusi untuk mendapatkan suatu kebenaran yang relatif dan selalu dapat diperbaiki. Jadi, demokrasi berhadapan dengan suatu kebaruan yang abadi. Maka karenanya, solusi yang diambil oleh demokrasi pun tidak selamanya berwajah lembut, tetapi sering berwajah sangar dan berwatak radikal.⁷

Solusi oleh demokrasi yang terus menerus diperbarui tersebut, yang mengikuti dinamika yang ada dalam masyarakat, mestinya haruslah berwajah kerakyatan,

⁶ Munir Fuady, Konsep Negara Demokrasi,..., h. 3.

⁷ Abbas Anwar, *Bung Hatta dan Ekonomi Islam "Menangkap Makna Maqashid al Syari'ah"* (Jakarta: Kompas, 2010), h. 23.

meskipun tidak harus berwajah lembut. Artinya demokrasi harus dapat menyerap aspirasi yang ada dalam masyarakat menurut ukuran-ukuran dan terminologi sosioligis.⁸

Banyak pemikir bangsa dan kaum intelek di seluruh dunia baik itu di bangsa barat maupun bangsa timur yang banyak mengemukakan ajaran kedaulatan rakyat, salah satunya di indonesia yaitu Mohammad Hatta. Mohammad Hatta adalah salah satu pemikir *founding father* bangsa Indonesia. Pemikirannya sangat *brilliant*, mengandung ide-ide besar dan mencakup detail dalam praktiknya. Sehingga tepatlah ia diposisikan sebagai bagian dari dwitunggal yang melengkapi kekurangan Soekarno di awal-awal memimpin negeri ini. Hatta adalah seorang pemikir gaya bicaranya tidak meletup-letup sebagaimana soekarno. Ia bukan agitator yang menyihir rakyat dengan pidato-pidato. Menurutnya rakyat seharusnya disadarkan keadaannya dengan pendidikan, bukan dibuai dengan pidato-pidato yang membakar.

Salah satu gagasan Mohammad Hatta yang banyak dibahas orang antara lain mengenai kedaulatan rakyat. Menurutnya, kedaulatan rakyat ialah bahwa kekuasaan untuk mengatur pemerintahan negara ada pada rakyat. Rakyat berdaulat, berkuasa untuk menentukan cara bagaimana ia harus diperintah. Tetapi putusan rakyat yang dapat menjadi peraturan pemerintahan bagi orang semuanya ialah keputusan yang ditetapkan dengan cara mufakat dalam satu perundingan yang teratur bentuknya dan jalannya. Bukanlah keputusan yang diambil secara mendadak dalam suatu rapat orang

⁸ Munir Fuady, Konsep Negara Demokrasi,..., h. 168.

banyak yang tersendiri saja, dengan menyerukan bersama-sama mufakat. Tidak ada permusyawaratan terlebih dahulu, sebab itu bukanlah keputusan menurut kedaulatan rakyat. ⁹ Kedaulatan rakyat memberi kekuasaan yang tertinggi kepada rakyat, tetapi juga meletakkan tanggungjawab yang terbesar. Dasar pemerintahan yang adil ialah, siapa yang mendapat kekuasaan dia itulah yang bertanggungjawab. Manakala rakyat sekarang mendapatkan kekuasaan menurut kedaulatan rakyat, rakyat itu pulalah yang bertanggungjawab. ¹⁰

Oleh karena itu, dasar yang teguh untuk susunan negara bukanlah pemerintahan yang didasarkan kepada orangnya yang bersifat fana, melainkan kepada pemerintahan yang berdasar kepada tanggung jawab yang luas dan kekal. Kedaulatan rakyat adalah pemerintahan yang berdasarkan pertanggunganjawab yang luas dan kekal. Yang berdaulat adalah rakyat dan yang memikul tanggungjawab adalah rakyat pula. Rakyat adalah jenis yang kekal, yang hidupnya tak bergantung kepada umur manusia yang menyusunnya. Manusia satu-satunya yang ada dalam lingkungan itu akan lenyap dan berganti, tetapi rakyat tetap ada. Selama ada negara dan rakyatnya. ¹¹

Demikian juga dengan kedaulatan rakyat yang dalam praktik hidup berlaku sebagai pemerintah rakyat. Syarat bagi segala kekuasaan ialah keadilan, yang dengan sendirinya harus membawa kesejahteraan bagi segala orang. Manakala pemerintahan rakyat tidak membawa keadilan dan kesejahteraan, melainkan menimbulkan

⁹ Mohammad Hatta, *Demokrasi Kita: Pikiran-Pikiran Tentang Demokrasi Dan Kedaulatan Rakyat* (Bandung: Sega Arsy, 2014), h. 51.

¹⁰ Mohammad Hatta, *Demokrasi Kita*,..., h. 52.

¹¹ Mohammad Hatta, *Demokrasi Kita*,..., h. 56.

kezaliman dan pencederaan, kekuasaannya itu tidak bisa kekal. Dalam pengakuannya akan lahir tenaga dan aliran yang menentang, yang akan membawa kejatuhannya dan memunculkan penggantinya. 12

Atas dasar tersebut, penulis berusaha untuk membahas dan menganalisa masalah tersebut dan dituangkan melalui skripsi dengan judul "GAGASAN KEDAULATAN RAKYAT MENURUT MOHAMMAD HATTA".

B. Rumusan Masalah

Dari uraian tersebut di atas maka penulis dapat merumuskan sebagai berikut:

- 1. Bagaimana gagasan kedaulatan rakyat menurut Mohammad Hatta?
- 2. Bagaimana relevansi konsep kedaulatan rakyat Mohammad Hatta dengan demokrasi dalam konteks negara Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

- 1. Untuk mengetahui gagasan kedaulatan rakyat Mohammad Hatta.
- 2. Untuk mengetahui relevansi konsep kedaulatan rakyat Mohammad Hatta dengan demokrasi dalam konteks negara Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Suatu penilaian ditentukan oleh besarnya manfaat yang dapat diambil dari penelitian tersebut, adapun manfaat yang dapat diambil penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

¹² Mohammad Hatta, *Demokrasi Kita*,..., h. 57.

1. Manfaat Teoritis

- a. Memberikan sumbangan pengetahuan pemikiran pada pemahaman politik dan ketatanegaraan untuk kemudian memberikan konstribusi pada perkembangan bidang pemahaman politik ketatanegaraan dalam masyarakat, terutama mengenai pemikiran Mohammad Hatta tentang kedaulatan rakyat.
- b. Memberikan wacana dan menambah referensi mengenai pemikiran para tokoh nasional dalam bidang ketatanegaraan.

E. Kerangka Pemikiran

Suatu paham dalam teori ilmu tata negara yang menyatakan bahwa kekuasaan tertinggi dalam suatu negara adalah rakyat dan kekuasaan berasal dari rakyat ialah teori kedaulatan rakyat.

Menurut John Locke, kedaulatan rakyat ialah rakyat menyerahkan kekuasaannya kepada negara. Dengan demikian negara mempunyai kekuasaan yang besar. Akan tetapi, kekuasaan ini ada batasnya. Batas itu ialah hak-hak alamiah dari manusia yang melekat padanya ketika manusia itu lahir. Hak ini sudah ada sebelum negara terbentuk. Karena itu negara tidak bisa mengambil atau mengurangi hak alamiah ini. Hak tersebut adalah hak atas kehidupan, kemerdekaan, dan milik pribadi. Ketiga hak ini adalah hak asasi manusia. 13

Lain halnya dengan John Locke, menurut J.J. Rousseau kedaulatan rakyat

-

¹³ Ni'matul Huda, *Ilmu Negara*,..., h. 188.

ialah ajaran yang memberi kekuasaan tertinggi kepada rakyat, atau juga disebut pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. ¹⁴ Menurut teori ini, yang memilih dan menetapkan penguasa pemerintahan adalah rakyat. Negara yang menganut paham teori ini di sebut negara demokrasi. Ada kaitannya kedaulatan rakyat dengan negara hukum, dimana di jelaskan bahwa penyelenggaraan pemerintahan adalah wakil rakyat yang telah dipilih dan ditetapkan oleh rakyat. Plato memberikan perhatian yang lebih tinggi pada hukum. Menurutnya, penyelenggaraan pemerintahan yang baik ialah yang diatur oleh hukum. ¹⁵ Teori ini juga dianut oleh negara islam dalam menentukan penguasa negara atau wakil rakyat, wakil rakyat dalam negara islam di sebut dengan Imam (*khalifah*), sesungguhnya Imam (*khalifah*) itu diproyeksikan untuk mengambil alih peran kenabian dalam menjaga agama dan mengatur dunia. ¹⁶

Salah satu produk pengetahuan Barat yang diadopsi oleh tokoh-tokoh pergerakan nasional sebagai alat perlawanan terhadap kolonial pada waktu itu adalah gagasan demokrasi berbasis spirit sosialisme. Dalam kontruksi sosial dan spesifik dan partikular inilah gagasan demokrasi di Indonesia terbentuk oleh semangat dan ide-ide sosialistik. Secara umum pemikiran, tokoh pergerakan nasional seperti Mohammad Hatta merupakan tokoh yang mewakili demokrasi berbasis sosialisme yang menjadi inheren dalam tradisi pergerakan nasional di Indonesia.

_

¹⁴ Ni'matul Huda, *Ilmu Negara*,..., h. 189.

¹⁵ Ni'matul Huda, *Ilmu Negara*,..., h. 91.

¹⁶ Imam Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah: Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara Dalam Syariat Islam*, (Bekasi: PT Darul Falah, 2012), h. 1.

Dalam hal ini, kekuatan utama dalam gagasan Mohammad Hatta yang menempatkannya pada posisi istimewa pergerakan nasional adalah keyakinan akan pentingnya kedaulatan rakyat. Bahwa menyadari prinsip kedaulatan rakyat merupakan landasan dari negara yang diperjuangkan, maka pola pendidikan dalam konteks pencerdasan kehidupan rakyat menjadi hal penting.¹⁷

Prinsip kedaulatan rakyat lainnya ialah rakyat sebagai landasan demokrasi Indonesia, maka rakyatlah yang akan menuntun nasibnya urusan-urusan politik maupun ekonomi bagi nasib penghidupan mereka. Sehingga perjuangan kemerdekaan Indonesia menjadi buah tangan dari perjuangan rakyat bukan perjuangan elitemaupun semata-mata perjuangan para pemimpin politik.¹⁸

Dengan meminjam pandangan dari seorang pujangga besar yaitu Thorbecke, Mohammad Hatta menggarisbawahi demokrasi sebagai pemerintahan daripada diperintah. Meskipun rakyat harus menjalankan perintah yang dirumuskan dalam perundang-undangan, namun pemerintahan kebijakan dibangun berdasarkan kehendak rakyat. 19

Demikianlah sepintas gambaran mengenai pemahaman pemikiran-pemikiran Mohammad Hatta terhadap demokrasi serta kedaulatan rakyat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang nantinya banyak membantu penulis dalam membuat kerangka teoritis. Dari paparan singkat di atas, penulis akan menjadikan teori tersebut

Amin Imran, *Mohammad Hatta*, (Jakarta: Mutiara Sumber Widya, 1984), h. 87.
 Amin Imran, *Mohammad Hatta*,..., h. 89.

¹⁹ Muhammad Hatta, *Indonesia Merdeka*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), h. 122.

sebagai pembahasan untuk melihat permasalahan pemahaman teori tersebut dan ruang lingkupnya.

F. Metode Penelitian

Suatu penulisan skripsi agar lebih terarah dan mudah dipahami maka memerlukan suatu metode yang sesuai dengan objek yang dikaji. Karena metode berfungsi sebagai cara mengerjakan sesuatu untuk mendapatkan hasil yang optimal dan memuaskan, seperti yang diinginkan olah semua peneliti. Di samping itu metode merupakan cara bertindak supaya penelitian berjalan terarah dan mencapai hasil yang optimal. Berdasarkan asumsi tersebut, maka dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan Metode Penulisan sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Dalam Penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu suatu jenis penelitian yang sumber datanya diperoleh melalui penelitian terhadap buku-buku, maupun karya tulis lain yang berhubungan dengan persoalan yang diteliti atau dibahas. Termasuk data-data sejarah yang diperlukan.

2. Sumber Data

Karena jenis penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan (Library research) maka sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder.

- a. Sumber data primer yaitu sumber data pokok yang dijadikan sumber oleh penulis dengan meneliti secara langsung terhadap karya-karya yang ditulis oleh Mohammad Hatta.
 - 1. Kumpulan karangan jilid 1.
 - 2. Demokrasi kita
 - 3. Untuk negeriku
 - 4. Kedaulatan rakyat, otonomi, dan demokrasi
- b. Sumber data sekunder yaitu data pendukung yang memperjelas data primer, yang termasuk data sekunder adalah buku-buku, karya tulis lain, artikel dan makalah yang ada hubungannya dengan penelitian.

3. Teknik pengumpulan data

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini antara lain dengan cara mendokumentasikan data-data terdapat dari buku-buku tersebut, mengumpulkan dan melakukan analisis deskriptif terhadap sumber-sumber tersebut. Menferifikasi sumber, menginterpretasikannya dalam sebuah tulisan.

4. Teknik pengolahan data

 a. Pengolahan data secara induktif, yaitu pengolahan data-data yang bersifat khusus dan kemudian mengambil suatu kesimpulan hingga menjadi yang bersifat umum.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan dan memperoleh gambaran mengenai skripsi ini, penulis menjabarkan sistematika pembahasan terbagi dari 5 bab yang memuat dengan rincian sebagai berikut :

BAB I, bab pendahuluan yang membahas tentang : Latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II, bab yang membahas tentang biogarfi Mohammad Hatta: biografi dan karya Mohammad Hatta, sosiohistoris pemikiran Mohammad Hatta.

BAB III, bab yang membahas tentang kedaulatan rakyat secara umum: teori kedaulatan rakyat, pengerian kedaulatan rakyat, pengerian demokrasi.

BAB IV, bab hasil analisis penelitian gagasan kedaulatan rakyat mohammad hatta: gagasan kedaulatan rakyat Mohammad Hatta, latar belakang pemikiran kedaulatan rakyat Mohammad Hatta, konsep kedaulatan rakyat Mohammad Hatta dalam konteks negara Indonesia.

BAB V, penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran.

BAB II

BUNGA RAMPAI PEMIKIRAN MOHAMMAD HATTA

A. Biografi dan karya Mohammad Hatta

a. Biografi Mohammad Hatta

Mohammad Hatta merupakan salah satu *founding father* Indonesia, yang lebih akrab dikenal dengan sebutan Bung Hatta. Sebutan "*bung*" pada bagian depan namanya kemungkinan diberikan sebagai ciri khas Hatta sebagai tokoh "dwi tunggal" pemimpin Indonesia, yakni Bung Karno dan Bung Hatta.²⁰

Mohammad Hatta lahir di Bukit Tinggi, yaitu sebuah kota sejuk yang terletak di deretan Bukit Barisan yang diapit oleh dua buah gunung, yaitu gunung Merapi dan gunung Singgalang. Beliau lahir pada 12 Agustus 1902 dari ayah yang bernama Haji Mohammad Jamil dan ibu bernama Siti Saleha. Kedua orang tuanya berasal dari luhak yang berbeda. Ayahnya berasal dari daerah Batu Hampar sekitar 9 kilometer dari kota Payakumbuh yang termasuk dalam luhak Limo Puluh Kota. Sementara ibunya berasal dari kota Bukit Tinggi yang termasuk Luhak Agam.

Ayah Hatta adalah anak dari seorang guru agama dan pimpinan Tariqat Naqsyabandi yang cukup terkenal di daerahnya, yaitu Syekh Arsyad. Beliau meninggal pada usia yang terbilang masih muda yaitu 30 tahun, ketika Hatta berusia

_

²⁰ Sulaiman Effendi, *Kiprah Dan Pemikiran Politik Tokoh-Tokoh Bangsa* (Jogjakarta: Ircisod, 2014), h. 87.

tujuh bulan. Maka dari itu beliau tidak sempat merawat dan membesarkan Hatta. Sedangkan ibunya adalah anak dari Ilyas Bagindo Marah, yaitu pedagang yang cukup kaya di kota Bukit Tinggi.

Nama Mohammad Hatta yang sebenarnya adalah Mohammad Athar. Kata Mohammad diambil dari nama Nabi, sementara kata Athar berasal dari bahasa Arab yang artinya harum. Oleh masyarakat minangkabau, kata Athar sering diucapkan Atta, lama kelamaan berubah menjadi Hatta. Akhirnya melekatlah nama Mohammad Athar menjadi Mohammad Hatta.

Dalam keluarga, Hatta adalah anak kedua, kakaknya seorang perempuan yang bernama Rafi'ah yang lahir pada tahun 1900 dari perkawinan ibunya dengan Mas Agus Haji Ning, yaitu seorang pedagang dari Palembang yang sudah sering berhubungan dagang dengan Ilyas Bagindo Marah. Hatta mempunyai empat orang adik yang semuanya adalah perempuan. Jadi, Hatta adalah anak laki-laki satu-satunya di keluarganya.

Hatta sangat dekat dengan kakeknya baik dari pihak ayahnya maupun dari pihak ibunya. Ia memanggil kakeknya dari pihak ayah dengan sebutan Ayah Gaek dan dari pihak ibu dengan sebutan Pak Gaek. Kakek dari pihak ayahnya adalah seorang yang alim dan mempunyai ilmu yang dalam tentang agama. Beliau mempunyai Surau atau yang sering disebut Pesantren jika di Pulau Jawa, Surau beliau terletak di Batu Hampar. Surau tersebut merupakan tempat pusat pengajian

Tariqat Naqsyabandi yang banyak didatangi orang-orang untuk belajar dan menimba ilmu dari berbagai daerah di Sumatera. Sementara kakek dari pihak ibu adalah seorang pedagang yang cukup berhasil di Bukit Tinggi yang mempunyai relasi cukup banyak baik dari bangsa Indonesia maupun dari bangsa Belanda.

Pada usia 5 tahun, Hatta dimasukkan ke Sekolah Rakyat oleh Pak Gaeknya, tetapi Hatta gagal karena ia tidak lolos tes. Tes penerimaan waktu itu bukanlah didasarkan kepada kemampuan anak, melainkan calon murid harus melakukan melingkarkan tangannya diatas kepala. Apabila ujung jari tangan kanan dapat menyentuh telinga kiri, maka anak itu akan diterima menjadi murid. Umurnya sudah cukup untuk bersekolah. Ternyata jari tangan kanan Hatta belum dapat menyentuh telinga kirinya sehingga ia gagal masuk sekolah. Enam bulan kemudian (setelah umurnya cukup enam tahun) Hatta dimasukkan kembali ke Sekolah Rakyat dan duduk satu kelas dengan kakaknya Rafi'ah.

Hatta dikenal sebagai anak yang rajin dan pandai. Sebelum masuk ke Sekolah Rakyat, Hatta sudah bisa membaca dan menulis. Ia diajarkan membaca dan menulis oleh anak perempuan Ledeboer. Ledeboer adalah seorang bekas tentara Belanda yang mendirikan sekolah swasta dan ia juga adalah seorang teman kakeknya. Karena keinginan Pak Gaeknya untuk memasukkan Hatta ke sekolah, sebelum Hatta masuk Sekolah Rakyat, ia dimasukkan ke sekolah swasta yang didirikan oleh Ledeboer. Menurut Deliar Noer, masa kecil Hatta dilaluinya dengan biasa saja, seperti bermain, bersekolah dan mengaji. Selain itu, Hatta juga belajar di Surau milik Syekh

Muhammad Jamil Jambek yang terletak satu kilometer dari rumahnya. Ia belajar mengaji dan agama di Surau tersebut dengan diajar oleh murid-murid yang sudah senior dan untuk pendalaman agama ia diajar langsung oleh Syekh Muhammad Jamil Jambek.

Hatta belajar di Sekolah Rakyat hanya sampai tahun ketiga. Pada pertengahan tahun ajaran, ia pindah ke sekolah Belanda, yaitu Europes Lagere School (ELS) dan diterima di kelas dua. Setamat dari ELS pada tahun 1916, Hatta melanjutkan sekolahnya ke Meer Uitgebreid Lagere Onderwijs (MULO), yaitu sekolah setingkat SMP di Padang dan berhasil menyelesaikan pelajarannya di sekolah ini tiga tahun kemudian (tahun 1919).²¹

Setelah tamat dari Padang, Hatta melanjutkan studi ke sekolah dagang Prins Hendrik School di Jakarta. Di Jakarta Hatta tinggal di rumah Raja Bangsawan dari Bengkulu, yaitu seorang mantan inspektur kepala sekolah untuk wilayah Sumatera Selatan.²² Di waktu senggang, Hatta sering berkunjung ke rumah pamannya Ayub Rais dari keluarga yang sudah agak jauh, yaitu seorang pedagang yang cukup berhasil dan banyak membantu Hatta. Dengan pamannya ini Hatta sering bertukar pikiran terutama mengenai hal bisnis atau ekonomi dan perdagangan. Bahkan pada waktu libur, Hatta sering terlibat dalam dunia bisnis yang dilakukan pamannya tersebut untuk melihat hubungan antara praktik riil itu sendiri dengan teori yang ia dapatkan di

_

²¹ Anwar Abbas, *Bung Hatta Dan Ekonomi Islam: Menangkap Makna Maqashid Al Syar'iah* (Jakarta: Kompas, 2010), h. 29.

²² Anwar Abbas, *Bung Hatta Dan Ekonomi Islam*,..., h. 30.

bangku sekolah. Hatta sangat disukai oleh pamannya karena ia cerdas dan pengetahuannya sangat luas. Ia sering di belikan buku-buku oleh pamannya bahkan pamannya itu berjanji akan menyekolahkan Hatta ke negeri Belanda.

Disamping hal-hal di atas, pengalaman yang cukup penting dan memepengaruhi pembentukan kepribadian Hatta ialah kegiatannya dalam Jong Sumatranen Bond (JSB) di tingkat pusat, serta pergaulannya dengan orang terkemuka di Jakarta, terutama dengan mereka yang berasal dari Sumatera, khususnya Minangkabau. Pada Desember tahun 1919, Hatta terpilih menjadi bendahara umum di organisasi Jong Sumatranen Bond (JSB). Tetapi Hatta hanya ingin menjabat sebagai bendahara tersebut selama satu tahun saja, karena ia harus menyelesaikan studinya dan akan menghadapi ujian.

Dalam oraganisasi tersebut, Hatta dipandang berhasil oleh teman-temannya. Terutama karena ia mampu mengatasi masalah utang pecetakan *evolutie* yang seharusnya dilunasi oleh organisasi JSB. Setelah masa jabatan Hatta sebagai bendahara di organisasi JSB itu habis, Hatta pun berhenti dari organisasi tersebut. Dengan kemampuannya dalam mengelola uang tersebut, pada saat berhenti, Hatta bisa meninggalkan uang saldo untuk organisasi tersebut. Hal ini tentu saja tidak lepas dari keberhasilan Hatta dalam menarik uang iuran dari para anggota dan mendapatkan donasi dari para tokoh-tokoh terkemuka di Jakarta yang berasal dari Sumatera.

Di antara teman dekat Hatta di organisasi JSB adalah Bahder Djohan dan

Amir, masing-masing sebagai sekretaris dan ketua dari JSB. Keduanya adalah mahasiswa Fakultas Kedokteran Stovia. Bersama teman-temannya inilah Hatta pergi mengunjungi orang-orang terkemuka yang berasal dari Sumatera antara lain, Landjumin Datuk Tumenggung, Haji Agoes Salim, Abdoel Moeis, dan Sutan Muhammad Zain. Sementara itu, dengan Haji Agus Salim, Hatta dan kawan-kawan banyak berdiskusi tentang hubungan Islam dan politik. Khususnya bentuk masyarakat yang dikehendaki oleh Islam. Bagi Salim, Islam mengehendaki terbinanya suatu masyarakat yang adil dan makmur yang berpangkal pada persamaan tetapi juga kesempatan untuk maju bagi mereka yang berusaha, suatu masyarakat yang juga tolong menolong dan menjauhkan diri dari eksplolitasi sesama masyarakat. Tetapi segalanya dikaitkan Salim dengan pengabdian diri kepada Allah. Oleh sebab itu, Salim tidak setuju jika sosialisme itu berasal dari Marx.²³

Hatta menyelesaikan pendidikannya di sekolah dagang PHS selama tiga tahun, pada tahun 1921 dengan menempati ranking ketiga. Kemudian Hatta melanjutkan pendidikannya ke negara Belanda dengan bantuan beasiswa dari yayasan Van Deventer. Maka pada 3 Agustus 1921 Hatta berlayar dari Teluk Bayur menuju Belanda untuk melanjutkan studinya dengan menumpang kapal tambora milik Rotterdam Lloyd.

Di Belanda, Hatta kuliah di Handels Hoogere School, yaitu sebuah sekolah

²³ Anwar Abbas, *Bung Hatta Dan Ekonomi Islam*,..., h. 32.

tinggi ekonomi Rotterdam. Ia mengambil jurusan ekonomi perdagangan, dua tahun kemudian ia meraih gelar sarjana muda. Kemudian ia melanjutkan ke tingkat sarjana, ia mengambil jurusan ekonomi kenegaraan, karena itu ia terpaksa memperpanjang masa kuliahnya. Kuliah ini baru ia selesaikan pada tahun 1932.

Selain sibuk belajar, Hatta juga aktif berorganisasi. Bahkan keterlambatan Hatta dalam menyelesaikan studinya itu bukan karena ia tidak bisa menyelesaikannya lebih cepat, akan tetapi karena ia aktif di dalam organisasi dan juga karena kesibukannya di dalam organisasinya itu.

Sejak kecil Hatta sudah aktif dan senang berorganisasi. Pengalaman dalam berorganisasinya ini sudah ia dapatkan sejak ia menempuh pendidikan di kampung halamannya. Pada saat belajar di MULO, Hatta masuk dalam organisasi sepakbola sekolahnya yang bernama Swallow. Semula ia hanya menjadi anggota biasa tetapi kemudian ia dipercaya sebagai bendahara. Alasan orang memilih Hatta sebagai bendahara adalah karena kawan-kawannya tahu bahwa Hatta sangat tertib dalam hal keuangan.²⁴

Pada Januari 1918, dibentuklah oleh Nazir Datuk Pamuncak organisasi Jong Sumateranen Bond (JSB) cabang Padang, dengan memilih sekali pengurusnya. Dalam pengurus cabang itu duduk Anas Munaf sebagai ketua, Bahder Djohan sebagai sekretaris, Ainsjah Jahya dan Malik Hitam sebagai komisaris, dan juga Hatta sebagai

_

²⁴ Anwar Abbas, *Bung Hatta Dan Ekonomi Islam*,..., h. 35.

bendahara.²⁵

Hal ini telah membuat informasi tentang JSB yang menyebar di kalangan masyarakat semakin meluas, tidak hanya di masyarakat perkotaan namun di masyarakat daerah-daerah pun telah mengetahui informasi tentang JSB ini. Dan karena masyarakat sudah tahu tentang tujuan dari organisasi ini baik, maka banyak masyarakat yang bersimpati sehingga bantuan dan dana pun mengalir ke kas organisasi.

Kepandaian Hatta mencari dan menggali dana diketahui oleh para pengurus JSB di Jakarta. Oleh karena itu ketika Hatta pindah dan sekolah di Jakarta oleh kawan-kawannya ia dipilih menjadi bendahara JSB pusat. Hatta juga diminta untuk membenahi keuangan majalah yang dimiliki JSB yang bernama Jong Sumatera yang sudah lama tidak terbit karena utangnya ke penerbit sudah banyak dan uang kas sudah kosong.²⁶

Semangat perjuangan Hatta sebenarnya sudah terlihat sejak ia menuntut ilmu di sekolah tinggi dagang (Handels Hagere School) yang terletak di Rotterdam Belanda. Saat itu, Hatta bergabung dengan sebuah komunitas Pelajar Indonesia yang kemudian diberi nama Perhimpunan Indonesia (Indonesische Vereeniging), pada tahun 1922.²⁷ Selain itu juga keterlibatan Hatta dalam politik didorong oleh semangat

²⁵ Mohammad Hatta, *Untuk Negeriku: Bukittinggi-Rotterdam Lewat Betawi* (Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2011), h. 61.

²⁶ Anwar Abbas, *Bung Hatta Dan Ekonomi Islam*,..., h. 37. ²⁷ Sulaiman Effendi, *Kiprah Dan Pemikiran*,..., h. 89.

nasionalisme yang muncul sejak ia berumur enam tahun karena ia sering melihat kesewenangan tentara Belanda di depan rumahnya sendiri di pinggir kota Bukit Tinggi. Ia merasa sangat terusik oleh praktik-praktik ketidakadilan yang dilakukan oleh pihak kolonial Belanda pada saat itu terhadap penduduk. 28 Pada forum diskusi di komunitas tersebut, Hatta selalu mengajak dan mengingatkan kepada mahasiswa Indonesia akan cita-cita kemerdekaan negara Indonesia, merdeka dari penjajahan Belanda.

Kesadaran politik Mohammad Hatta mulai mendapatkan penempaan setelah ia bersekolah di MULO, Padang, pada saat ia mengenal JSB dan kemudian menjadi anggota pengurus perkumpulan ini. Di kota Padang ini ia berkenalan dengan tokohtokoh lokal seperti Sutan Said Ali, seorang guru sekolah Adabiah yang kemudian diasingkan Belanda ke Digul dan Taher Marah Sutan, yaitu seorang tokoh dan sekretaris dari organisasi serikat usaha yang didirikan oleh tokoh-tokoh masyarakat Padang yang bergerak dalam bidang sosial. Lewat perkenalannya inilah Hatta bersentuhan dengan pikiran-pikiran politik yang berkembang waktu itu baik melalui media surat kabar yang dia baca atau bertemu dan berdialog langsung dengan tokohtokoh yang datang dari Jawa.²⁹

Pada 19 Februari 1922 Indische Vereniging menyelenggarakan pertemuan di Hague dalam rangka pemilihan pimpinan organisasi yang baru. Tetapi di samping itu

Anwar Abbas, Bung Hatta Dan Ekonomi Islam,..., h. 38.
 Anwar Abbas, Bung Hatta Dan Ekonomi Islam,..., h. 39.

pertemuan itu juga membicarakan hal-hal lain termasuk di antaranya adalah mengganti nama Indische Vereniging menjadi Indonesische Vereniging (Perhimpunan Indonesia). Tidak lama kemudian nama Indonesische Vereniging diganti dengan Perhimpunan Indonesia (Indonesia Association). Begitu juga dengan nama majalah yang mereka miliki yang tadinya bernama Hindia Putera diganti menjadi Indonesia Merdeka.³⁰

Pada tahun 1926, Hatta dipercaya untuk menjabat sebagai ketua dalam Perhimpunan Indonesia dan karena itulah ia terhambat dalam menyelesaikan kuliahnya. Meskipun demikian kepemimpinan Hatta dapat memberikan perubahan tersebut.31 Menariknya terhadap perhimpunan dalam sistem kepemimpinan di PI ini pemilihan ketua diadakan sekali dalam setahun. Otomatis pada tahun 1927 Hatta sudah diganti oleh orang lain, tetapi sampai tahun 1930 ia tetap menjadi ketua PI. Hal ini menunjukkan bahwa ia sangat dipercaya oleh temanteman mahasiswanya. Barulah pada 1931 Hatta tidak lagi duduk sebagai ketua, itu pun karena dia tidak lagi mau dipilih sebab dia harus berkonsentrasi menghadapi ujian sarjana, tetapi meskipun demikian dia tetap membantu PI.

Menurut Soebadio Sastrosatomo pemikiran politik Hatta yang berkembang dan menjadi satu strategi untuk mencapai *Indonesia Merdeka*, diperoleh Hatta secara pribadi dan sebagai perkembangan kolektif dari mahasiswa yang belajar di negeri

Anwar Abbas, *Bung Hatta Dan Ekonomi Islam*,..., h. 43.
 Sulaiman Effendi, *Kiprah Dan Pemikiran*,..., h. 90.

Belanda. Sikap politik Hatta yang sangat menjunjung tinggi persatuan Indonesia dan perlunya kesadaran kerakyatan, kesadaran kebangsaan, dan kesadaran bahwa Indonesia harus maju, tampak tercermin ketika ia terpilih menjadi ketua PI untuk pertama kalinya.³²

Sikap keras nonkoperatif Hatta telah membawa PI menjadi organisasi anti imperialisme. Dalam kapasitasnya sebagai ketua PI, Hatta sering menghadiri pertemuan Internasional yang diselenggarakan oleh pemuda-pemuda dari berbagai negeri terjajah. Bahkan menurut Astrid Susanto, Bung Hatta berjasa besar dalam memperkenalkan dan memperjuangkan penyebaran nama Indonesia, walaupun pada awalnya terbatas pada PI dan di luar negeri di berbagai forum pemuda Internasional di negeri Belanda, Paris, Perancis, dan lainnya. Sebagai contohnya, dalam kongres "Menentang Imperialisme dan Penindasan Kolonial" yang diadakan di Brussel, Belgia, pada tahun 1927, Hatta dan beberapa kawannya yang datang mengahdiri kongres tersebut mewakili Perhimpunan Indonesia berpidato dengan judul "Tujuan dan Politik Pergerakan Nasional Indonesia". Hatta antara lain mengemukakan "4":

"Setelah Indonesia dapat mencapai kemerdekaan sepenuhnya, sebaiknya *staatvorm-nya* adalah *statenbond* atau *bondstaat*, susunan pemerintahannya harus kuat dari bawah dengan tujuan mendidik rakyat mengatur pemerintahan negara secara demokrat yang bersendi kedaulatan rakyat sepenuhnya, kuat dan berwibawa".

³² Anwar Abbas, *Bung Hatta Dan Ekonomi Islam*,..., h. 44.

³³ Anwar Abbas, *Bung Hatta Dan Ekonomi Islam*.... h. 46.

³⁴ Zulfikri Suleman, *Demokrasi Untuk Indonesia: Pemikiran Politik Bung Hatta* (Jakarta: Kompas, 2010), h. 79.

Melihat gerakan yang dilakukan Hatta, pihak pemerintah Belanda mulai merasa gerah. Mereka berusaha untuk membatasi ruang gerak dan mencari alasan untuk menangkap Hatta. Momen itu pun tiba, pada tahun 1926, Hatta mendapat kunjungan dari Semaun, salah satu pimpinan PKI. Pada kunjungannya itu, Semaun memberikan tawaran kepada Hatta agar Perhimpunan Indonesia dapat memimpin pergerakan Indonesia. Selain itu, dalam pertemuan itu, Semaun dan Hatta membentuk sebuah perjanjian yang kemudian di sebut "Konverensi Semaun-Hatta". Hal ini yang kemudian menjadi alasan bagi pemerintah Belanda untuk menangkap Hatta.³⁵

Persetujuan itu tidak diakui oleh pimpinan komunis Internasional karena menurut mereka perjuangan kemerdekaan tidak boleh dipimpin oleh golongan kebangsaan. Oleh karena itu semestinya perjanjian itu tidak berlaku. Tetapi meskipun demikian pemerintah belanda tetap menjadikan hal tersebut sebagai dasar dan pintu masuk untuk menagkap Hatta. 36 Pihak Belanda beranggapan bahwa Hatta dan rekanrekannya telah mengadakan kegiatan-kegiatan agitator dan telah mengikuti partai terlarang yaitu PKI. Tuduhan ini jelas tidak beralasan karena sejatinya Hatta adalah seorang tokoh yang menentang gerakan komunis.³⁷ Maka pada tanggal 25 September 1927, Hatta dan rekan-rekannya di tangkap dan dipenjarakan di Rotterdam. Pada sidang kedua yang di gelar pada tanggal 22 Mei 1928, Hatta menolak tuduhantuduhan tersebut melalui sebuah pidatonya yang berjudul "Indonesia Merdeka"

Sulaiman Effendi, Kiprah Dan Pemikiran,..., h. 91.
 Anwar Abbas, Bung Hatta Dan Ekonomi Islam,..., h. 48.

³⁷ Anwar Abbas, *Bung Hatta Dan Ekonomi Islam*,..., h. 48.

(Indonesie Vrij). Dalam persidangan ini, Hatta mendapatkan pembelaan dari tiga orang pengacara yang salah satunya adalah merupakan orang parlemen Belanda, yaitu Dr. J.E.W. Lewis.³⁸

Dengan mendapatkan pembelaan dari Dr. J.E.W. Lewis yang seorang pengacara yang piawai, Hatta dan rekan-rekannya bisa terbebas dari tuduhan-tuduhan pemerintah Belanda. Pengadilan itu memutuskan bahwa Hatta dan rekan-rekannya tidak terbukti bersalah atas tuduhan tersebut dan dibebaskan dari tahanan. Begitu bebas, Hatta kembali aktif di PI. Ia mulai membina kader-kader muda seperti Abdullah Syukur dan Rusbandi, mahasiswa hukum di universitas Leiden dan Sutan Sjahrir.³⁹

Selain sibuk berjuang secara politik di luar negeri, Hatta juga aktif memantau dan memberikan saran serta pandangannya terhadap perjuangan yang dilakukan oleh kawan-kawannya di tanah air. Hatta menyambut dengan gembira berdirinya partai baru yang bernama Partai Nasional Indonesia (PNI) pada 14 Juli 1927 di Bandung. Apalagi di antara para pendirinya adalah bekas anggota PI yang sudah kembali ke Indonesia. Partai ini yang dipimpin oleh Ir. Sukarno. 40

Tujuan dari partai ini sama dengan PI, yaitu mencapai Indonesia merdeka. Tetapi partai ini tidak berumur panjang, PNI dituduh oleh pemerintah akan melakukan pemberontakkan, maka pada akhir Desember 1929 Sukarno di tangkap.

³⁹ Anwar Abbas, *Bung Hatta Dan Ekonomi Islam*,..., h. 52. ⁴⁰ Anwar Abbas, *Bung Hatta Dan Ekonomi Islam*,..., h. 52.

³⁸ Sulaiman Effendi, *Kiprah Dan Pemikiran*,..., h. 91.

Sukarno di ajukan ke pengadilan dan di jatuhi hukuman penjara. Melihat perkembangan ini, PNI dibubarkan oleh Sartono. Kemudian Sartono mendirikan partai baru yang bernama Partai Indonesia (PARTINDO) yang memiliki tujuan yang sama dengan PNI. Keputusan Sartono telah menimbulkan perpecahan di kalangan anggota PNI lainnya karena banyak anggota PNI yang tidak setuju dengan keputusannya tersebut. Kemudian mereka mendirikan organisasi baru yang diberi nama Golongan Merdeka.

Pada tahun 1931, Hatta memilih mengundurkan diri dari jabatan ketua Perhimpunan Indonesia dengan alasan menyelesaikan kuliahnya. Meski begitu, Hatta tidak sepenuhnya keluar dari keanggotaan PI. Ia juga berjanji akan senantiasa memberikan bantuan terhadap PI. Keputusan Hatta mengundurkan diri dari jabatannya itu menimbulkan protes dari para anggotanya, karena pasalnya atas pengunduran ini, PI jatuh ke tangan para kaum Komunis yang pada saat itu kaum Komunis mendapat arahan dari Belanda dan Moskow.

Pada bulan Desember 1931, para pengikut Hatta di Indonesia mendirikan gerakan tanding yang disebut "Gerakan Merdeka". Dan kemudian gerakan tersebut berganti nama menjadi Pendidikan Nasional Indonesia atau PNI baru. Hal tersebut tak luput dari pandangan Hatta dan Sjahrir yang saat itu masih berada di Belanda keduanya merasa perlu untuk mempersiapkan kepemimpinan PNI di Indonesia. Akan tetapi pada saat itu Hatta hendak menyelesaikan kuliahnya di Belanda, maka Sjahrir

⁴¹ Sulaiman Effendi, *Kiprah Dan Pemikiran*,..., h. 92.

harus meninggalkan studinya untuk memimpin PNI. Sjahrir berniat akan melanjutkan kuliahnya setelah Hatta selesai dari kuliah dan kembali ke Indonesia untuk menggantikan dirinya di PNI. ⁴²

Hatta meninggalkan Rotterdam pada 20 Juli 1932 menuju tanah air. Sewaktu di Belanda Hatta memberikan perhatian khusus kepada perjuangan kawan-kawannya di tanah air. Ia mendorong para anggota Golongan Merdeka untuk mendirikan partai baru. Maka berdirilah partai baru yang bernama Pendidikan Nasional Indonesia yang lebih dikenal dengan sebutan PNI baru. Setelah kembali ke Indonesia, Hatta langsung bergabung dengan Sjahrir dalam PNI baru. Kemudian dalam perjuangannya dalam PNI ini, Hatta lebih menekankan pada pendidikan politik dan pendidikan kader bagi masyarakat.

Melihat langkah-langkah Hatta yang berbahaya bagi pemerintah Belanda, gerak-geriknya pun diawasi. Ketika ia pergi ke Sumatera Barat untuk bertemu dengan masyarakat misalnya, ia sudah diperintahkan meninggalkan daerah itu, padahal baru beberapa hari ia berada di daerah kelahirannya. Begitu juga ketika ia menghadiri rapat partai di Yogyakarta. Baru saja ia berpidato, polisi Belanda menyuruhnya berhenti. Dari Yogya Hatta pergi ke Solo untuk mengadakan rapat di kota tersebut tetapi rapat itu dububarkan oleh polisi. Dapat dilihat bahwa pada saat itu pemerintah Belanda takut akan perjuangan kemerdekaan yang Hatta lakukan, karena aktivitas

⁴² Sulaiman Effendi, *Kiprah Dan Pemikiran*,..., h. 82.

⁴³ Anwar Abbas, *Bung Hatta Dan Ekonomi Islam*,..., h. 54.

⁴⁴ Sulaiman Effendi, *Kiprah Dan Pemikiran*,..., h. 93.

⁴⁵ Anwar Abbas, *Bung Hatta Dan Ekonomi Islam*,..., h. 57.

politik masyarakat yang tergabung dalam partai mulai tampak semakin meningkat, oleh karena itu kegiatan-kegiatan partai mulai dibatasi, penyelenggaraan rapat-rapat dilarang dan para tokohnya tidak lagi bebas bepergian. Jika para tokoh ingin pergi ke suatu daerah atau tempat maka mereka harus meminta izin terlebih dahulu kepada pemerintah Belanda.

Sebagai konsekuensi perjuangan, Hatta merasa bahwa pada gilirannya ia akan ditangkap Belanda. Sebelumnya, pada 31 Juli 1933, Sukarno ditangkap dengan alasan menyiapkan pemberontakan melawan pemerintah dan di buang ke Ende di pulau Flores. Dugaan Hatta ternyata benar, karena pada 25 Januari 1934, ia ditangkap oleh pemerintah Belanda ketika sedang berada di Jakarta. Dalam hari yang sama juga ditangkap Sjahrir dan Bondan.

Pada 16 November 1943, keluarlah keputusan pengadilan untuk mengasingkan Hatta bersama enam orang pengurus PNI baru lainnya, ke Boven Digul. Ia diberangkatkan melalui pelabuhan Tanjung Priok. Di dalam kapal ia diberangkatkan bersama-sama Sjahrir, Bondan, Maskun, Murwoto, Burhanudin, dan Suka. Ia diberangkatkan ke Boven Digul dengan cara estafet, awalnya ia berangkat dari pelabuhan Tanjung Priok menuju Surabaya dan Ujung Pandang, kemudian dari Ujung Pandang ia naik kapal yang lebih kecil menuju Ambon, dari Ambon ia naik kapal yang kecil lagi, kapal itu bernama Albatros ke Digul Irian Jaya.

Mereka sampai di tanah merah (Digul) pada 28 Januari 1935. Daerah ini

-

⁴⁶ Anwar Abbas, *Bung Hatta Dan Ekonomi Islam*,..., h. 59.

terletak jauh di pedalaman selatan Irian, di tepi sungai Digul yang jauhnya sekitar 600 km dari tepi laut. Tempat ini dibangun oleh belanda sebagai tempat buangan orangorang PKI yang memberontak pada tahun 1926/1927 di Sumatera Barat. Oleh karena itu sejumlah besar penghuninya adalah orang Minangkabau.

Setelah mendapat telegram dari pemerintahan Belanda yang terkait pemindahannya, pada bulan Februari 1937, Hatta dan Sjahrir dipindahkan ke Banda Neira, salah satu pulau di Kepulauan Banda di Maluku. Di sana, Hatta dan Sjahrir menyewa subuah rumah besar untuk dijadikan tempat tinggal mereka. Di sini, Hatta bertemu dengan Dr. Tjipto Mangonkusumo dan Iwa Kusumasumanteri. 47 Hatta tinggal lima tahun di Banda Neira. Kalau tidak pecah perang pasifik mungkin Hatta akan tinggal lebih lama lagi di daerah buangan tersebut. Perang pasifik pecah pada 8 Desember 1941. Jepang menyerang pangkalan angkatan laut Amerika di Pearl Harbour di Hawaii secara tiba-tiba tanpa mengumumkan perang terlebih dahulu. Setelah menyerang Hawaii, Jepang juga menyerang daerah-daerah di Asia, dan dalam waktu yang singkat sebagian besar daerah Asia jatuh ke tangan Jepang, termasuk Indonesia.48

Mengantisipasi keadaan tersebut pemerintah Belanda memindahkan para tahanan politik tersebut ke negara dan atau daerah yang dianggap aman supaya para tahanan tersebut nanti tidak bekerja sama dengan pihak Jepang. Sebagian para

Sulaiman Effendi, Kiprah Dan Pemikiran,..., h. 94.
 Anwar Abbas, Bung Hatta Dan Ekonomi Islam,..., h. 64.

tahanan yang berada di Digul dipindahkan ke Australia. Sementara Hatta dan Sjahrir di pindahkan dari Banda Neira pada Februari 1942 ke Sukabumi Jawa Barat.

Jepang mendarat di berbagai daerah di pulau Jawa pada Maret 1942. Meskipun tentara Belanda berusaha keras untuk menyerang tentara Jepang tetapi mereka tidak mampu membendung kekuatan tentara Jepang. Pada akhirnya Belanda menyerah pada Jepang dan dengan waktu yang singkat, Jepang dapat menguasai sebagian besar daerah Indonesia. Jepang dapat menang atas Belanda dikarenakan rakyat Indonesia yang membantu Jepang untuk mengalahkan Belanda dan juga Jepang mendapatkan dukungan dari rakyat Indonesia. Penduduk Indonesia menyambut kedatangan Jepang, karena Jepang dianggap sebagai pembebas bangsa Indonesia dari penjajahan Belanda. Akhirnya pada 9 Maret 1942 di Kalibata pemerintah Hindia Belanda menyerah kepada tentara Jepang. Dengan demikian berakhirlah penjajahan Jepang di Indonesia yang sudah berlangsung selama lebih kurang tiga setengah abad.

Karena pemerintah Belanda sudah tidak berkuasa lagi, Hatta pun bebas. Kemudian Hatta di bawa oleh utusan Jepang ke Jakarta untuk bertemu Mayor Jenderal Harada. Kepala pemerintah pendudukan Jepang untuk pulau Jawa. Kemudian Harada menawarkan kepada Hatta jabatan penting. Hatta menolak menjadi pegawai pemerinah Jepang, tetapi ia mau mejadi peasihat Jepang karena dengan cara ini Hatta bisa melindungi rakyatnya dan membela kepentingan rakyat Indonesia.

Seiring dengan bebasnya Hatta. Sukarno juga bebas dari penjara dan tiba di Jakarta pada bulan Juli 1942. Ia dijemput oleh Hatta di pelabuhan Pasar Ikan, yang terletak di daerah kota. pertemuan itu adalah pertemuan pertama mereka sejak Sukarno ditangkap tahun 1933. Malam harinya mereka berunding tentang apa yang akan mereka lakukan di bawah penjajahan Jepang. Di dalam perundingan tersebut juga ikut Sjahrir. Tetapi seperti yang sering terjadi sebelumnya, malam itu juga terjadi lagi perbedaan yang tajam antara kedua tokoh. Sukarno yakin dalam peperangan ini Jepang akan keluar sebagai pemenang karena dia melihat angakatan perang Amerika, Inggris dan Belada sudah lumpuh. Oleh karena itu Sukarno mengajak Hatta dan Sjahrir untuk bekerja sama dengan Jepang. Maksudnya ialah untuk meyusun kembali pergerakan rakyat. Sementara Hatta tidak setuju dan menolak, karena menurut Hatta, Amerika yang akan menang. Sebab dalam pandangan Hatta, industri Amerika lebih maju, mereka pasti akan melakukan serangan balasan. Hatta juga melihat sikap pemerintah Jepang yang tidak megizinkan adanya gerakan rakyat dengan dibubarkannya partai-partai adalah tidak positif bagi perjuangan bangsa. Tetapi menurut Sjahrir, karena Sukarno dan Hatta sudah dikenal oleh Jepang, dia menyarankan agar mereka bekerja sama dengan Jepang, sementara dia dan temantemannya akan bekerja secara diam-diam melakukan gerakan perlawanan bawah tanah yang tujuannya adalah melawan pemerintahan Jepang. 49

Sementara itu, sukarno mengajukan permohonan kepada pemerintah Jepang

⁴⁹ Anwar Abbas, *Bung Hatta Dan Ekonomi Islam*,..., h. 67.

melalui perantaraan Shimizu agar pemerintahan Jepang mengizinkan ia mendirikan sebuah pergerakan rakyat di Jawa. Akhirnya, pada bulan Desember 1942, diresmikanlah organisasi pergerakan rakyat dengan nama Pusat Tenaga Rakyat yang disingkatkan menjadi *POETERA*. Dipimpin oleh empat serangkai yaitu Sukarno, Hatta, Ki Hajar Dewantara dan Kiai Haji Mas Mansur. Sukarno menjadi pemimpin besar *POETERA*, Hatta menjadi direktur Jenderal, Ki Hajar Dewantara menjadi kepala bagian Pendidikan, Kiai Haji Mas Mansur menjadi kepala bagian keselamatan rakyat.⁵⁰

Pada Oktober 1943 pemerintah Jepang membentuk tentara sukarela Pembela Tanah Air (PETA). Tugas utama dari organisasi ini adalah bagaimana mereka dapat membantu pemerintah Jepang dalam mempertahankan Indonesia dari serangan tentara Amerika dan sekutu-sekutunya. Kesempatan ini dipergunakan sebaik-baiknya oleh para pemuda Indonesia untuk berlatih menjadi tentara yang nantinya akan digunakan untuk merebut kemerdekaan.⁵¹

Proklamasi kemerdekaan Indonesia tak lepas dari posisi Jepang yang semakin tersudut dalam perang melawan tentara sekutu. Untuk mendapat simpati rakyat Indonesia, maka pada Mei 1945 dibentuk Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Diantaranya adalah Dr. Radjiman Wediodiningrat diangkat menjadi ketuanya dan Hatta diangkat sebagai anggotanya. Pada 16 Juli 1945, BPUKI

⁵⁰ Mohammad Hatta, *Untuk Negeriku: Menuju Gerbang Kemerdekaan* (Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2011), h. 44.

⁵¹ Anwar Abbas, *Bung Hatta Dan Ekonomi Islam*,..., h. 72.

menyelesaikan pembahasannya untuk menerima rancangan Undang-Undang Dasar. Pada hari yang sama diterima berita dari Tokyo bahwa Jepang akan mengakui kemerdekaan Hindia Timur secepat mungkin kemudian diputuskan untuk membentuk sebuah panitia persiapan kemerdekaan Indonesia yang memungkinkan wakil-wakil daerah menyuarakan pandangan mereka atas isu-isu kemerdekaan. PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia) dibentuk pada 7 Agustus 1945. Ir. Sukarno diangkat menjadi ketua, Hatta diangkat menjadi wakil. Hari-hari itu merupakan situasi sulit bagi Jepang, karena di berbagai front tentara Amerika berhasil mengalahkan tentara-tentara Jepang. Bahkan tentara Amerika sudah semakin dekat denga negeri Jepang sendiri, di daratan Asia pun Jepang mendapat pukulan karena Rusia telah melakukan serangan ke Manchuria pada 8 Agustus 1945. ⁵²

Dalam situasi genting seperti itu, pada 9 Agustus 1945, tiga orang pemimpin Indonesia, yaitu Sukarno, Hatta, dan Radjiman Sediodiningrat, diundang ke Dallat, satu daerah terletak 300 km dari Saigon, ke tempat markas Marsekal Terauchi Hisaichi, panglima angkatan perang Jepang di Asia Tenggara, sehubungan dengan adanya perintah dari Tokyo mengenai pemberian kemerdekaan kepada Indonesia. Tetapi ketika perjalanan pulang dari Saigon, mereka telah mendengan serangan Rusia terhadap Manchuria, perkiraan Hatta, dalam waktu satu atau dua minggu lagi Jepang akan menyerah, akan tetapi ternyata Jepang meyerah lebih awal dari yang ia duga. Pada 14 agustus 1945 Jepang menyatakan diri menyerah.

⁵² Anwar Abbas, *Bung Hatta Dan Ekonomi Islam*,..., h. 74.

Melihat perkembangan yang begitu cepat, maka para pemimpin Indonesia berkumpul dan mengadakan pembicaraan-pembicaraan apa yang harus dilakukan. Mereka tampak tidak berbeda pendapat tentang perlunya memproklamasikan kemerdekaan secepatnya, tetapi mereka berbeda pendapat tentang siapa yang akan memproklamirkannya. Sjahrir mengusulkan supaya pengumuman kemerdekaan itu tidak usah dilakukan oleh PPKI. Cukup Sukarno saja. Tetapi menurut Hatta, Sukarno tidak akan bersedia melakukan dengan cara demikian, karena terikat dengan kedudukannya sebagai ketua panitia persiapan kemerdekaan.⁵³

Pada 15 Agustus 1945, para pemuda menemui Hatta dan Sukarno secara terpisah, Hatta didatangi oleh Subadio Sastrosatomo dan Subianto, sementara Sukarno didatangi oleh Wikana dan kawan-kawannya. Namun tidak terdapat kesepakatan. Akhirnya pada 16 Agustus 1945 pada pagi buta, Hatta dan Sukarno dipaksa para pemuda tersebut untuk mengikuti mereka ke Rengasdengklok, tempat asrama PETA, 75 km dari Jakarta ke sebelah timur arah Karawang. Alasan mereka melakukan hal itu adalah karena Sukarno dan Hatta harus diselamatkan sebab pada hari itu akan terjadi revolusi dimana para pemuda akan menggempur pasukan Jepang. Tetapi ternyata hal itu tidak terjadi. Akhirya petang hari pada 16 Agustus 1945, Hatta dan Sukarno dibawa kembali ke Jakarta. Pada malam itu juga, mereka pergi ke rumah laksamana Maeda. Maeda menyambut kedatangan mereka dan bahkan berjanji akan melindungi usaha mereka. PPKI mengadakan rapat di rumah Maeda. Sukarno dan

⁵³ Anwar Abbas, *Bung Hatta Dan Ekonomi Islam*,..., h. 75.

Hatta menceritakan hasil pertemuan mereka dengan Nishimura. Sesudah itu mereka pergi ke ruang tamu diikuti oleh Subardjo, Sukarni, dan Sayuti Malik. Di ruangan itu mereka menyusun teks proklamasi.⁵⁴

Setelah selesai mereka kembali ke ruang sidang lalu Sukarno membacakan teks proklamasi tersebut. Hatta mengusulkan agar semua yang hadir menandatangani naskah itu. Tetapi Sukarni meminta agar naskah itu ditandatangani oleh Sukarno dan Hatta saja. Sidang yang bersejarah itu berakhir pukul 03.00 pagi pada tanggal 17 Agustus 1945. Sesudah itu mereka pulang. Sebelum pulang, Hatta masih sempat sahur untuk puasa hari itu, dan setelah shalat subuh dia tidur di rumahnya. Kemudian pagi hari mereka berkumpul kembali di rumah Sukarno di il. Pegangsaan Timur 56 (sekarang jalan proklamasi) Jakarta Pusat. Tepat pukul 10.00 pagi naskah proklamasi dibacakan oleh Sukarno dan Hatta berdiri di sampingnya. Suasana sangat khidmat kemudian dikibarkanlah bendera Merah Putih. Sejak saat itu bangsa Indonesia telah menjadi bangsa yang merdeka.⁵⁵ Pada 8 Agustus 1945 PPKI bersidang kembali. Dalam persidangan tersebut ditetapkan dan disepakatilah beberapa hal, yaitu UUD negara yang dinamakan dengan UUD 1945, bentuk negara yaitu berupa Republik serta Presiden dan Wakil Presiden. Untuk presiden terpilih Ir. Sukarno sementara untuk wakilnya terpilih Hatta.

Tatkala Hata berada di Bukittinggi, dia mendapat telegram dari Sukarno.

Anwar Abbas, Bung Hatta Dan Ekonomi Islam,..., h. 78.
 Anwar Abbas, Bung Hatta Dan Ekonomi Islam,..., h. 79.

Sukarno meminta Hatta untuk pergi ke India bertemu dengan Jawaharlal Nehru meminta bantuan senjata. Untuk kelancaran misinya tersebut Sukarno telah mempersiapkan segala sesuatunya. Menurut Sukarno, kepergian Hatta ke India harus dirahasiakan, maka jika pihak Belanda mengetahuinya, maka tentu akan membahayakan Hatta. Oleh karena itu dalam paspor yang telah dipersiapkan oleh Sukarno, nama Hatta diganti menjadi Abdullah, jabatannya ialah co-pilot. Kemudian Hatta berunding dengan Jawaharlal Nehru. Pada saat mereka berunding, Nehru mengatakan bahwa India tidak bisa memberikan bantuan senjata, karena pada saat itu India masih dijajah oleh Inggris. Akan tetapi nehru berjanji akan memberi dukungan politik dan membela perjuangan Indonesia di forum Internasional.

Tidak lama setelah Hatta tiba di tanah air Belanda melakukan agresi pada 21 Juli 1947. Ketika itu ia sedang dalam perjalanan dari Bukittinggi menuju Pematang Siantar. Ia baru mengetahui serangan Belanda tersebut ketika di Sibolga melalui radio. Kemudian tentara Belanda menyerang pertahanan RI di Medan. Belanda juga memantau pergerakan para pejuang melalui udara, mobil iring-iringan Hatta di tembak. Hatta dan rombongan mengambil jalan memutar dan kembali ke Bukittinggi. Mereka tiba di kota tersebut pada 29 Juli 1947. Dari kota itulah Hatta memimpin perjuangan untuk seluruh Sumatera. Ia kembali ke Yogya setelah perjanjian Renville.

Perjanjian Renville sangat merugikan pihak Indonesia. Daerah Indonesia semakin menyempit, tentara-tentara Indonesia bahkan harus di tarik dari daerah-daerah tertentu. Oleh karena itu Masyumi dan PNI tidak setuju dengan perjanjian

tersebut. Mereka menarik dukungannya terhadap pemerintahan sehingga akhirnya kabinet yang dipimpin waktu itu oleh Amir Syarifuddin jatuh. Untuk mengatasi kemelut pemerintah, Sukarno menunjuk Hatta sebagai formatur dan tentu sebagai Perdana Menteri.⁵⁶

Pada 29 Januari 1948, Hatta mengumumkan anggota kabinetnya. Dalam kabinet tersebut Hatta tidak melibatkan seorangpun dari partai komunis. Hal ini tentu saja membuat Amir Syarifuddi dan kawan-kawannya marah sehingga mereka membuat sebuah front yang disebut dengan Front Demokrasi Rakyat (FDR). Dalam FDR itu bergabung semua organisasi yang berhaluan komunis.⁵⁷

Tidak lama setelah kembalinya Hatta ke Yogya, pemerintah Belanda melanggar perjanjian Renville, pada 19 Desember 1948 tentara Belanda menyerang Yogyakarta dan kota-kota lainnya. Ketika itu Hatta sedang berada di Kaliurang. Melihat keadaan yang genting seperti itu, Hatta kembali ke Yogya dan mengadakan sidang kabinet. Dalam sidang itu, memutuskan bahwa pemerintah tidak akan meninggalkan Yogyakarta untuk memudahkan hubungan dengan Komisi Tiga Negara (KTN) yang dibentuk oleh PBB. Beberapa jam setelah sidang kabinet, Hatta ditahan oleh pemerintah Belanda, begitu juga Sukarno dan beberapa pejabat lainnya. Tiga hari kemudian Hatta bersama Assaat, Pringgodigdo dan Suryadarma dibuang ke Pangkal Pinang, Bangka. Sementara Sukarno, H. Agus salim dan Sjahrir dibuang ke

Anwar Abbas, Bung Hatta Dan Ekonomi Islam,..., h. 83.
 Anwar Abbas, Bung Hatta Dan Ekonomi Islam,..., h. 84.

Brastagi, Sumatera Utara.⁵⁸

Sementara itu, selama para pemimpin nasional Indonesia berada dalam tawanan pemerintah Belanda, para pemimpin lainnya tetap melakukan perjuangan. Jenderal Sudirman misalnya, memimpin perang gerilya. Ia meninggalkan Yogyakarta pada 91 Desember 1948. Di Sumatera, Syafruddin Prawiranegara membentuk Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI). Mereka tetap membangun komunikasi dengan dunia luar melalui radio sehingga dunia luar dapat mengetahui dan memantau perkembangan di dalam negeri dan mengetahui bahwa Belanda melakukan penyerangan dan telah menduduki ibukota RI. Tetapi perlawanan terjadi di mana-mana. Aksi Belanda dikutuk oleh negara-negara lain. ⁵⁹ Pada akhirnya dewan keamanan PBB mengadakan sidang dan menyuruh Belanda untuk menghentikan agresinya terhadap Indonesia dan para pemimpin Indonesia harus dibebaskan.

Melihat kuatnya tekanan dari luar maupun dalam negeri, akhirnya Belanda bersedia berunding. Perundingan dimulai pada 14 April 1949 di Jakarta. Delegasi Indonesia dipimpin oleh Mohammad Roem. Delegasi Belanda dipimpin oleh Dr. Van Royen. Perundingan itu diawasi oleh PBB. Perundingan tersebut berjalan alot dan hampir mengalami jalan buntu. Akhirnya Komisi Tiga Negara meminta Hatta untuk datang ke Jakarta, karena Hatta dianggap mampu mengahdapi Belanda di meja perundingan. Dalam pertemuan tidak resmi itu, Hatta mengatakan kepada Belanda

Anwar Abbas, Bung Hatta Dan Ekonomi Islam,..., h. 85.
 Anwar Abbas, Bung Hatta Dan Ekonomi Islam,..., h. 87.

agar pemimpin yang ditawan segera dibebaskan dan dikembalikan ke Yogyakarta, kalau permintaan Hatta itu tidak dilakukan, maka perundingan tidak akan dilanjutkan.

Akhirnya pada 7 Mei 1949 kesepakatan tercapai. Dalam kesepakatan itu dikatakan bahwa pemerintah RI akan dikembalikan ke Yogyakarta, dan dalam waktu dekat akan diadakan Konferensi Meja Bundar (KMB) yang pesertanya Belanda, Indonesia dan dihadiri oleh pihak BFO (Negara-Negara Federal) untuk membicarakan masalah pembentukan negara Indonesia Serikat. 60

Pada minggu pertama Januari 1949, Yogyakarta diserahkan kembali kepada pemerintah RI. Hatta kembali ke Yogyakarta pada 6 Juli 1949. Seminggu kemudian Syafruddin menyerahkan mandat kepada Perdana Menteri Hatta. 61 Kemudian Hatta ditunjuk untuk menjadi ketua delegasi Indonesia ke Konferensi Meja Bundar (KMB) yang akan diadakan di Belanda. Ketua delegasi dari BFO dipimpin oleh Sultan Hamid II. Karena konferensi akan membicarakan nasib bangsa dan negara dimasa yang akan datang.

Pada 15 Desember 1949 KMB disetujui oleh Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP), keesokan harinya Ir. Sukarno dipilih menjadi Presiden RI, sementara Drs. Moh. Hatta diangkat menjadi Perdana Menteri dari kabinet RIS yang pertama. Pada 27 Desember 1949, Hatta sudah berada di Den Haag untuk menghadiri acara pengakuan kedaulatan RIS oleh Belanda. Dengan demikian, berakhirlah perjalanan

Anwar Abbas, Bung Hatta Dan Ekonomi Islam,..., h. 88.
 Anwar Abbas, Bung Hatta Dan Ekonomi Islam,..., h. 88.

panjang perlawanan Indonesia mengahadapi Belanda.

Hatta menjadi Perdana Menteri Republik Indonesia Sementara (RIS) sampai 17 Agustus 1950. Pada hari itu RIS menjelma menjadi negara kesatuan Republik Indonesia (RI). Lalu dibuatlah Undang-Undang Dasar Sementara. Undang-Undang Dasar yang tetap akan dibuat setelah diadakan pemilu, begitu pula halnya dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Dalam sidang DPRS pada Oktober 1950 Hatta diangkat menjadi wakil Presiden RI. Jabatan itu dipegangnya sampai 1956. Dalam rentang waktu tersebut, kabinet jatuh bangun dan pucuk pemerintahan silih berganti. Akibatnya pembangunan tidak dapat dilaksanakan. Karena pada saat itu sistem pemerintahan yang dijalankan adalah sistem parlementer, dimana dalam sistem tersebut kekuasaan partai yang besar, sementara kekuasaan Presiden dan wakil Presiden terbatas, bahkan bisa dikatakan Presiden dan wakil Presiden hanya sebagai lambang saja.

Sementara di beberapa daerah terjadi kekecewaan dan pemberontakan terhadap pemerintah pusat, perbedaan antara Hatta dan Sukarno juga semakin meruncing. Hal ini dipicu oleh banyak hal di antaranya adalah karena Sukarno sudah dipengaruhi oleh orang-orang komunis, 62 dan juga adanya perbedaan pendapat dan pemikiran-pemikiran untuk memimpin negara Indonesia ini. Hatta menginginkan pemerintahan Indonesia itu menganut kedaulatan rakyat yang berarti bahwa kekuasaan untuk mengatur pemerintahan negara Indonesia berada pada rakyat.

⁶² Anwar Abbas, *Bung Hatta Dan Ekonomi Islam*,..., h. 90.

Rakyat berdaulat, berkuasa untuk menentukan cara bagaimana harus diperintah.⁶³

Pada tanggal 20 Juli 1956, Hatta mengirim surat kepada DPR dan ditembuskan kepada Presiden Soekarno dan Dewan Menteri. Tetapi surat itu tidak diperhatikan oleh DPR, sehingga pada tanggal 23 November 1956 Hatta mengirim surat lagi ke DPR dan memberitahukan bahwa terhitung tanggal 1 Desember 1956 ia akan mengundurkan diri dari jabatannya sebagai wakil Presiden negara Indonesia. Pada tanggal 30 November 1956 DPR mengadakan sidang dan menerima permintaan Hatta tersebut untuk mengundurkan diri dari jabatannya itu. Sejak saat itulah Hatta menjadi warga negara biasa. Tetapi bukan berarti ia tidak terlibat lagi dalam masalah kenegaraan dan persoalan-persoalan bangsa. Jika ada hal-hal yang tidak sejalan dengan pemikirannya, ia tidak segan-segan untuk memberi nasehat kepada pemerintah. Setelah itu, segera setelah Hatta berhenti sebagai wakil presiden, muncullah era baru yang disebut dengan demokrasi terpimpin di mana Soekarno semakin bertambah kuat. Hatta kini menjadi rakyat biasa. Tetapi meski demikian seperti yang diungkapkan oleh Emil Salim "dalam hati sanubari dan mata masyarakat beliau adalah pemimpin rakyat. Bapak Pencipta Republik Indonesia Merdeka." Ia masih memiliki banyak aktivitas. Disamping mengajar di Universitas Gadjah Mada, ia banyak diminta untuk menjadi nara sumber dalam seminar-seminar yang diselenggarakan di dalam maupun di luar negeri.⁶⁴

63 Mohammad Hatta, Kedaulatan Rakyat, Otonomi dan Demokrasi, (Bantul: Kreasi Wacana, 2014), h. 6. ⁶⁴ Anwar Abbas, *Bung Hatta Dan Ekonomi Islam*,..., h. 92.

Setelah mengalami sakit beberapa lama, tokoh yang dicintai rakyat itu di panggil yang maha kuasa pada hari Jum'at, 14 Maret 1980 pukul 18.56 WIB. Ia dimakamkan di tempat pilihannya sendiri di pemakaman umum Tanah Kusir Jakarta Selatan. Karena ia ingin selalu dekat dengan rakyatnya.

B. Karya-karya Mohammad Hatta

Mohammad Hatta adalah seorang tokoh proklamator kemerdekaan Indonesia dan juga seorang wakil presiden pertama Indonesia. Mohammad Hatta juga merupakan salah satu pemikir yang menjadi *founding father* bangsa Indonesia. Hatta senang membaca buku, maka dari itu tidaklah heran wawasan ilmu pengetahuannya sangatlah luas. Tidak hanya membaca buku, ia juga menuliskan pemikiran-pemikirannya dalam sebuah karya-karya yang telah ia ciptakan yang masih bisa kita baca di berbagai karangan buku yang membahas tentang biografi Mohammad Hatta.

Berikut adalah karya, karangan dan juga pemikiran-pemikiran Hatta yang dituangkan ke dalam tulisan yang masih dapat kita baca dan dapat menambah wawasan kita mengenai pemikiran-pemikiran salah satu tokoh pelopor Indonesia ini.

1. Indonesia Dalam Masyarakat Dunia (Indonesia In De Wereldgemeenschap)

Tulisan Mohammad Hatta yang satu ini adalah membicarakan letak geografis kepulauan Indonesia serta peran aktifnya dalam lalu lintas perdagangan Internasional sejak dahulu kala serta syarat-syarat untuk memainkan peranan positif di masa depan, yaitu kemerdekaan politik dan ekonomi.⁶⁵

2. Indonesia Di Tengah-Tengah Revolusi Asia

Tulisannya ini menguraikan tentang gerakan kebangkitan bangsa-bangsa Asia dalam menghadapi penjajahan barat serta pengaruhnya terhadap kebangkitan gerakan kemerdekaan di Indonesia. ⁶⁶

3. Tata Ekonomi Dunia dan Pertarungan Kekuatan (Economische Wereldbouw En Machstegenstellingen)

Tulisannya yang ini dipidatokan Hatta ketika menerima jabatan ketua Perhimpunan Indonesia Tahun 1926. Dalam pidatonya ini, Hatta menguraikan sejarah pertentangan diantara negara-negara besar sejak abad ke-19. Wujud pertentangan ini adalah dalam bentuk perlombaan untuk menjajah bangsa-bangsa di Asia dan Afrika yang terutama dimotivasi oleh kepentingan ekonomi.⁶⁷

1. Indonesie Vrij (Indonesia Merdeka)

Tulisan Hatta yang satu ini merupakan pidato pembelaan Hatta di depan pengadilan Belanda, tepatnya di Den Haag pada bulan Maret 1928. Sebelumnya Hatta dan ketiga temannya dituduh oleh pemerintahan Belanda berkomplot dengan komunis yang akan menggulingkan pemerintahan Belanda. Pada intinya dari tulisan Hatta ini, ia ingin memunculkan kesadaran nasionalisme kepada para mahasiswa

66 Zulfikri Suleman, Demokrasi Untuk Indonesia,..., h. 77.

⁶⁵ Zulfikri Suleman, *Demokrasi Untuk Indonesia*,..., h. 77.

⁶⁷ Zulfikri Suleman, *Demokrasi Untuk Indonesia*,..., h. 77.

Indonesia yang berada di Belanda maupun warga negara Indonesia yaitu dengan melihat kebijakan pemerintah Belanda yang menindas dan mengintimidasi warga Indonesia, dan untuk mendorong semangat nasionalisme Perhimpunan Indonesia untuk memperjuangkan nasib bangsa Indonesia yang terjajah.

Sepanjang yang dapat dicatat, tulisan Hatta diatas merupakan pesan samar-samarnya yang pertama mengenai demokrasi dan arti pentingnya bagi Indonesia merdeka nantinya, yaitu susunan pemerintahan yang menjamin prinsip kedaulatan rakyat tanpa mempersoalkan bentuk negara yang akan dianut.⁶⁸

B. Sosiohistoris Pemikiran Mohammad Hatta

Mohammad Hatta ialah sosok yang dikenal sebagai seorang tokoh Indonesia yang memegang teguh prinsipnya. Ia selalu memperjuangkan status Indonesia di mata bangsa-bangsa negara lainnya dan hak-hak rakyat Indonesia di berbagai golongan, bukan hanya golongan tertentu saja. Hatta juga terkenal sebagai seorang negosiator yang handal, karena berbagai masalah pada awal kemerdekaan Republik Indonesia dapat ia atasi sehingga cepat terselesaikan. Bahkan karena keahliannya ini, di dalam organisasi Jong Sumatranen Bond (JSB) Hatta dapat melunasi utang percetakan majalah *evolutie* milik JSB yang menumpuk.

Selain menjadi wakil presiden pertama di Indonesia, Hatta juga merupakan seorang pemikir. Cakupan pemikiran-pemikirannya ini sangat beragam, mulai dari

-

⁶⁸ Zulfikri Suleman, *Demokrasi Untuk Indonesia*,..., h. 79.

pemikirannya tentang kebangsaan, pendidikan, ekonomi, filsafat, bahkan hingga soal hukum tata negara. Dalam tulisan ini, saya akan membahas pemikiran Mohammad Hatta mengenai hukum tata negara, yaitu tentang kebangsaan, demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM).

1. Pemikiran Mohammad Hatta Tentang Demokrasi

Hatta sangat beruntung, ia dilahirkan dan dibesarkan di dalam keluarga yang perekonomiannya sangat mencukupi, sehingga ia mampu menempuh pendidikan sampai ke negeri Belanda. Beda halnya dengan rakyat miskin dan serba kekurangan yang ada di tanah air. Hal ini menyadarkan Hatta untuk mengesampingkan kepentingan pribadinya demi rakyat Indonesia yang dijajah oleh Belanda pada saat itu. Di negeri Belanda, ia belajar tentang politik dan banyak berdiskusi di dalam organisasi yang ia ikuti yaitu Perhimpunan Indonesia yang bertujuan memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dari bangsa penjajah Belanda. Tetapi, kemerdekaan bukanlah tujuan akhir, melainkan jembatan yang membawa bangsa Indonesia melalui alur demokrasi politik dan demokrasi sosial menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera.

Hatta menolak demokrasi feodal⁶⁹ maupun demokrasi kapitalis⁷⁰, karena ia yakin bahwa demokrasi seperti ini akan memunculkan ekploitasi⁷¹ manusia atas manusia. Seperti buruh dieksploitasi oleh kaum kapitalis, petani dieksploitasi oleh pemilik tanah dan yang lemah dieksploitasi oleh yang kuat. Karena ia melihat pada waktu itu rakyaat Indonesia dijajah oleh bangsa Belanda yang dimana rakyat Indonesia yang menderita. Hatta menginginkan demokrasi yang dapat mengoreksi kekurangan ini. Hatta menginginkan hak politik seutuhnya harus berada ditangan rakyat, agar rakyat dapat mengembangkan hak demokrasinya dan perlu juga ditumbuhkan kekuatan pengimbang untuk mencegah kaum kapitalis dan feodal. Maka ia meyakini bahwa ada lima pokok yang dapat mengimbangi kekuatan untuk mencegah kapitalis dan feodal, yaitu:

- 1. Kebebasan berserikat dan berorganisasi.
- 2. Kebebasan menyatakan pendapat dalam bentuk tulisan dan lisan.
- Hak sanggahan secara massal. Dalam masa sekarang, sanggahan masal dapat terwujud seperti surat protes massal, poling publik, gugatan publik, aksi dan wacana publik.

 69 Feodal atau feodalisme adalah sistem sosial atau politik yang memberikan kekuasaan yang besar kepada golongan bangsawan.

⁷⁰ Kapital atau kapitalisme adalah sistem atau paham ekonomi (perekonomian) yang modalnya (penanam modalnya, kegiatan industrinya) bersumber pada modal pribadi atau modal perusahaan swasta dengan ciri persaingan di pasaran bebas.

⁷¹ Eksploitasi adalah pemanfaatan untuk keuntungan sendiri.

- 4. Pembangkitan semangat gotong royong, rasa bersama kolektivitas untuk bersama-sama menerima dan menolak sesuatu.
- 5. Pemberdayaan kekuatan ekonomi masyarakat dari bawah, *bottom-up*, dengan membuka aksesibilitas rakyat kecil pada pengelolaan sumber daya alam, seperti tanah, hutan, laut, pandai dan sebagainya.⁷²

Menurut Hatta, dengan mewujudkan kelima pokok ini, maka demokrasi politik akan tumbuh dan berimbang dengan demokrasi ekonomi yang terjalin dengan demokrasi kerakyatan. Lapangan pekerjaan banyak, dan juga medan kerja yang dihadapi oleh masyarakat adalah adil dan berimbang dengan kebijakan pemerintah yang memberikan perlindungan bagi mereka yang lemah.

Hatta menilai bahwa ada tiga pokok demokrasi yang telah mengakar di bumi Indonesia. Oleh karena itu, Hatta juga meyakini bahwa demokrasi tidak akan lenyap dari masyarakat Indonesia dan juga dari sistem perpolitikan Indonesia.

Adapun ketiga pokok demokrasi yang dimaksudkan oleh Mohammad Hatta adalah sebagai berikut:

- 1. Sosialisme barat yang berorientasi pada prinsip-prinsip humanisme.
- Agama Islam menghendaki terealisasinya kebenaran dan keadilan dalam masyarakat.

-

⁷² Salman alfarizi, *Mohammad Hatta: Biografi Singkat (1902-1980)*, (Jogjakarta: Garasi, 2009), h. 108.

3. Pola hidup kolektivisme yang telah terbentuk dalam diri masyarakat Indonesia yang mendiami berbagai daerah di Indonesia.⁷³

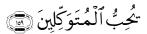
Hatta memasukkan Islam ke dalam unsur pendukung demokrasi, meskipun pemerintahan Indonesia tidak seluruhnya menganut sistem pemerintahan Islam, tetapi penilaian Hatta ini pantas dijadikan tolak ukur untuk pejabat pemerintahan untuk memikirkan kembali peran Islam dalam demokrasi Indonesia.

Karena definisi demokrasi dan demokrasi Islam (syura) hampir sama dalam konsep dan prinsipnya, meskipun keduanya mungkin dibedakan dalam penerapannya yang disesuaikan dengan adat dan kebiasaan masyarakat Indonesia.⁷⁴

Bahwa dalam Islam, demokrasi juga dibahas karena demokrasi dalam islam menganut sistem permusyawaratan, sebenarnya di dalam masyarakat pedesaan Indonesia dalam menyelesaikan masalah maupun mengambil keputusan untuk kepentingan bersama diambil jalan bermusyawarah. Konsep demokrasi ini sesuai dengan konsep demokrasi Islam yang tertuang dalam surat Ali Imran ayat 159 menerangkan tentang demokrasi, yaitu:

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ ٱللَّهِ لِنتَ لَهُمْ ۖ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ ٱلْقَلِّبِ لَٱنفَضُّواْ مِنْ حَوْلِكَ ۗ فَٱعۡفُ عَنَّهُمۡ وَٱسۡتَغۡفِرۡ هَٰمُ وَشَاوِرْهُمۡ فِي ٱلْأَمۡرِ ۖ فَإِذَا عَزَمۡتَ فَتَوَكَّلۡ عَلَى ٱللَّهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ

Sulaiman Effendi, Kiprah Dan Pemikiran,..., h. 97.
 Charles Kurzman, Islam Liberal: Pemikiran Islam Kontemporer Tentang Isu-Isu Global, (Jakarta: Paramadina, 2001), h. 129.



"Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu Berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu⁷⁵. kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya."

2. Pemikiran Mohammad Hatta Tentang Kebangsaan

Sebagai seorang terpelajar sejak usia muda dan juga sebagai seorang aktivis politik yang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, Hatta telah menyaksikan kekejaman dan ketidakadilan bangsa Belanda terhadap rakyat Indonesia kala itu. Meskipun Hatta tidak meragukan rasa nasionalisme kepada mereka yang berjuang bersama untuk kemerdekaan Indonesia, ketika di Belanda, ia menaruh harapan besar kepada Partai Nasional Indonesia (PNI) yang didirikan oleh bekas anggota Perhimpunan Indonesia (PI), namun ia harus menelan kekecewaan bahwa Partai Nasional Indonesia (PNI) telah dibubarkan oleh Sartono karena partai tersebut dituduh akan melakukan pemberontakan.

Kemudian kekecewaan Hatta kala itu telah sirna, berkat rasa nasionalisme yang tinggi yang dimiliki oleh pengikut Hatta di Indonesia, mereka mendirikan partai

⁷⁵ Maksudnya: urusan peperangan dan hal-hal duniawiyah lainnya, seperti urusan politik, ekonomi, kemasyarakatan dan lain-lainnya.

⁷⁶ Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an Departemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahnya Special For Women* (Bandung: Sygma, 2011), h. 71.

simpatisan yang bertujuan untuk memerdekakan Indonesia yaitu Golongan Merdeka.

Menurut Mohammad Hatta, rasa nasionalisme atau kebangsaan timbul karena adanya perasaan senasib yang telah tertanam dalam diri bangsa Indonesia. Terkait dengan hal ini, Hatta menegaskan bahwa nasionalisme itu ditentukan oleh adanya kesadaran akan persamaan dan tujuan. Kemudian dalam pengamatannya, menurut Hatta terdapat tiga macam kebangsaan, yaitu *kebangsaan cap ningrat, kebangsaan cap intelek*, dan yang terakhir adalah *kebangsaan cap rakyat*. Berikut adalah penjelasan dari tiga kebangsaan tersebut:

- 1. *Kebangsaan cap ningrat*. Jenis kebangsaan ini dimiliki oleh kaum ningrat atau keturunan para Raja. Dalam pandangan mereka, kekuasaan harus segera diambil alih dan merekalah yang paling berhak untuk melakukan itu. Dengan demikian, rasa kebangsaan semacam ini memosisikan rakyat biasa sebagai kaum marginal yang tidak berhak mengambil alih kekuasaan.
- 2. Kebangsaan cap intelek. Kebangsaan ini biasanya didengung-dengungkan oleh para kaum terpelajar di Indonesia. Para kaum intelek ini berpandangan bahwa merekalah yang paling berhak untuk mengambil alih kekuasaan dinegaranya. Hal itu sepenuhnya didasarkan kepada pengetahuan yang mereka miliki. Selain itu, para kaum intelek melaksanakan sistem kekuasaan yang hanya didasarkan pada sistem keturunan. Bagi mereka, bukan karena darahlah yang menjadikan mereka pantas untuk memimpin, tetapi kemampuan yang

⁷⁷ Sulaiman Effendi, *Kiprah Dan Pemikiran*,..., h. 98.

menentukan dan harus diutamakan. Dalam kebangsaan ini, posisi rakyat juga termarginalkan.

3. *Kebangsaan cap rakyat*. Kebangsaan ini muncul dikalangan rakyat Indonesia pada umumnya. Dalam teori kebangsaan ini, melihat bahwa seluruh rakyat Indonesia, tanpa terkecuali, memiliki hak untuk merebut kekuasaan.⁷⁸

Dari ketiga model kebangsaan di atas, model kebangsaan yang ketiga itulah yang lebih cocok kepada pemikiran kebangsaan Mohammad Hatta, yaitu *kebangsaan cap rakyat*. Menurut Hatta, *kebangsaan cap ningrat* dan *cap intelek* tidak cocok diterapkan di Indonesia, karena jika kedua jenis kebangsaan itu diterapkan di Indonesia, akan menimbulkan pemisah satu golongan tertentu dengan golongan lainnya.

Konsep kebangsaan "cap rakyat" ini adalah buah dari pemikiran Hatta yang sangat brilliant, karena kebangsaan itu tidak dapat dipisahkan dari kerakyatan. pemikiran hatta mengenai kebangsaan cap rakyat ini telah melintasi gagasan Hatta tentang persatuan, kemerdekaan, demokrasi, ekonomi dan gagasan politiknya yang lain. Konsep kebangsaan cap rakyat adalah gagasan Hatta yang ia amati ketika ia belajar di lingkungan masyarakatnya sendiri yaitu di Minangkabau kampung halamannya dan di Indonesia negaranya, secara keseluruhan serta ketika ia menjadi mahasiswa di Belanda.

⁷⁸ Sulaiman Effendi, *Kiprah Dan Pemikiran*,..., h. 98.

Karena itu Mohammad Hatta menginginkan seluruh masyarakat Indonesia untuk menganut sistem kebangsaan yang tidak saling merendahkan antara satu sama lain. Kebangsaan yang di inginkan Mohammad Hatta adalah kebangsaan yang menjunjung tinggi nilai-nilai kebersamaan. Dalam skala yang besar, Hatta tidak ingin seluruh masyarakat Indonesia merendahkan bangsa-bangsa lain di dunia.⁷⁹

3. Pemikiran Mohammad Hatta Tentang Hak Asasi Manusia (HAM)

Sekali lagi Hatta adalah sosok wakil presiden dan seorang pemikir yang memberikan hasil pemikirannya mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) bagi Indonesia. Hatta telah meletakkan dasar hukum, demokrasi dan HAM sejak ia menuntut ilmu di negeri Belanda. Pada saat itu, Hatta menjadi ketua dari organisasi Perhimpunan Indonesia (Indonesische Vereniging), kemudian ia ditangkap karena dituduh bekerja sama dengan komunis karena perjanjian "Semaun-Hatta". Dalam pembelaannya di pengadilan pemerintah Belanda dengan pidatonya "Indonesia Vriij" telah menggemparkan pengaadilan Belanda terhadap perlawanannya akan penindasan, diskriminasi, dan ketidakadilan pemerintahan Belanda terhadap rakyat jajahan. Pemikiran dan prinsip tersebut konsisten diperjuangkan Hatta dalam sidang BPUPKI ketika tokoh-tokoh nasional merumuskan naskah UUD 1945.

Terlihat usaha Hatta memperjuangkan pemikirannya tentang Hak Asasi Manusia (HAM), pada saat Hatta mampu menyelesaikan konfilk ideologi yang diakibatkan ditempatkannya Piagam Jakarta yang isinya mengatur asas ketuhanan:

⁷⁹ Sulaiman Effendi, *Kiprah Dan Pemikiran*,..., h. 98.

"dengan kewajiban menjalankan syariat islam bagi pemeluk-pemeluknya" sebagai pembukaan UUD 1945 dan pasal 29 UUD 1945⁸⁰. Hatta tegas menghapus "tujuh kata" tersebut.⁸¹ terlihat di sini, bahwa Hatta tampak sebagai penganut demokrasi yang memperjuangkan hak-hak rakyatnya yang mengacu pada persamaan hukum dan menjamin Hak Asasi Manusia (HAM) untuk mendapat kebebasan beragama bagi warga negaranya.

⁸⁰ Bunyi dari pasal 29 UUD 1945: (1) Negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. (2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

⁸¹ Salman alfarizi, Mohammad Hatta: Biografi Singkat (1902-1980),..., h. 102.

BAB III

TINJAUAN KEDAULATAN RAKYAT SECARA UMUM

A. Teori Kedaulatan Rakyat

Dalam ilmu negara ada beberapa teori kedaulatan menurut para ahli yang menjadi unsur terbentuknya sebuah negara, teori-teori tersebut ialah teori kedaulatan tuhan, kedaulatan hukum dan kedaulatan rakyat. Teori-teori ini menjelaskan bagaimana terbentuknya sebuah negara, seperti kedaulatan tuhan, teori ini menerangkan bahwa kekuasaan tertinggi terletak pada tuhan, Ia yang menciptakan alam semesta ini beserta isinya yaitu makhluk-makhluk yang ada didunia ini. Oleh karena itu Ia berkuasa atas suatu negara. Kemudian ada teori kedaulatan hukum, menurut teori ini kedaulatan hukum atau rechts-souvereiniteit kekuasaan tertinggi dalam suatu negara adalah hukum itu sendiri, baik raja atau penguasa maupun rakyat bahkan negara itu sendiri tunduk kepada hukum. Karena yang mengatur sikap, kehidupan tidak jauh dari aturan hukum. Maka hukumlah yang berdaulat. Yang terakhir yaitu teori kedaulatan rakyat menurut teori ini, rakyatlah yang berkuasa penuh, kekuasaan berada di tangan rakyat, rakyat yang mengawasi jalannya suatu pemerintahan di suatu negara oleh dewan-dewan rakyat yang dipilih oleh rakyat tersebut. Dalam skripsi ini, penulis akan membahas tentang teori kedaulatan rakyat, tapi sebelum membahas kedaulatan rakyat, penulis akan membahas tentang kedaulatan.

Kata kedaulatan berasal dari kata sovereignty (bahasa Inggris), souverainete (bahasa Prancis), sovranus (bahasa Italia). Kata-kata asing tersebut diturunkan dari kata latin yaitu superanus yang berarti "yang tertinggi" (supreme). Sarjana-sarjana dari abad pertengahan sering menggunakan pengertian-pengertian yang sama maknanya dengan istilah superanus, yaitu summa potestas atau plenitudo potestatis yang berarti wewenang tertinggi dari kesatuan politik.82 Jadi kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi dari suatu kesatuan politik. Pada abad pertengahan, kata kedaulatan sering dipakai oleh sarjana-sarjana Prancis sebagai istilah politik.

Jean Bodin ketika menulis buku tentang negara juga telah menggunakan kata kedaulatan itu dalam hubungannya dengan negara, yakni sebagai ciri negara, atribut negara yang membedakan negara dari persekutuan-persekutuan lainnya. 83 Jadi selain sebagai sistem pemerinahan, kedaulatan juga sebagai ciri dari setiap negara yang membedakannya. Seperti di Indonesia, menganut sistem demokrasi yang bersendi kedaulatan rakyat.

Teori kedaulatan rakyat terlahir dari kekuasaan raja yang mutlak dan menekan, di mana segala kehendak raja tidak bisa diganggu gugat maupun di bantah oleh rakyat.

Kedaulatan rakyat (popular sovereignty) dimaksudkan kekuasaan rakyat sebagai tandingan atau imbangan terhadap kekuasaan penguasa tunggal atau yang

Ni'matul Huda, *Ilmu Negara*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 169.
 Ni'matul Huda, *Ilmu Negara*,..., h. 170.

berkuasa.⁸⁴ Dalam hal ini, hubungan antara penguasa dan rakyat. Seperti penguasa tunggal atau penguasa dari wakil rakyat yang memerintah rakyat tetapi yang benarbenar berdaulat dalam hubungan ini ialah rakyat.

Teori kedaulatan rakyat ini dicetuskan oleh John Locke dan kemudian dilanjutkan oleh J.J Rousseau. Menurut Locke, memang rakyat menyerahkan kekuasaannya kepada negara. Dengan demikian negara memiliki kekuasaan yang besar. Tetapi, kekuasaan ini ada batasnya. Batas itu adalah hak alamiah dari manusia, yang melekat padanya ketika manusia itu lahir. Hak ini sudah ada sebelum negara terbentuk. Karena itu, negara tidak bisa mengambil atau mengurangi hak alamiah ini. Hak tersebut adalah hak atas kehidupan, kemerdekaan, dan milik pribadi. Ketiga hak ini adalah Hak Asasi Manusia (HAM).85

Ada beberapa menurut para ahli mengenai teori kedaulatan rakyat, yaitu:

1. JJ Rousseou

Sedangkan teori kedaualatan rakyat menurut J.J Rousseau adalah ajaran yang memberi kekuasaan tertinggi kepada rakyat atau juga disebut pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. 86 Menurut Rousseau ada dua macam kehendak dari rakyat, yaitu:

^{Ni'matul Huda,} *Ilmu Negara*,..., h. 188.
Ni'matul Huda, *Ilmu Negara*,..., h. 188.

⁸⁶ Ni'matul Huda, *Ilmu Negara*,..., h. 189.

1. Kehendak Rakyat Seluruhnya Yang Dinamai Volonte De Tous

Hanya dipergunakan oleh rakyat seluruhnya sekali saja yaitu waktu negara akan dibentuk melalui perjanjian masyarakat. Maksud dari volonte de tous ini untuk memberikan sandaran agar supaya mereka dapat berdiri sendiri dengan abadi, karena seluruh rakyat telah menyetujuinya. Keputusan ini merupakan suatu kebulatan kehendak dan jika negara itu sudah berdiri pernyataan setuju itu tidak bisa ditarik kembali lagi. Untuk selanjutnya volonte de tous tidak dapat dipakai lagi karena jika setiap keputusan harus dilakukan dengan suara bulat, maka negara tidak dapat berjalan.87

2. Kehendak Sebagian Dari Rakyat Yang Dinamakan Volonte Generale

Dinyatakan sesudah negara ada, sebab dengan keputusan suara terbanyak kini negara bisa berjalan sistem suara terbanyak ini dipakai oleh negara-negara demokrasi barat. Dengan demikian apa yang dimaksud Rousseau dengan kedaulatan rakyat itu sama dengan keputusan suara terbanyak.⁸⁸

Selain itu perlu diingat bahwa yang dimaksud oleh Rousseau dengan kedaulatan rakyat itu pada prinsipnya adalah cara atau sistem yang bagaimanakah pemecahan sesuatu soal itu menurut cara atau sistem tertentu yang memenuhi kehendak umum. Jadi kehendak umum itu hanyalah khayalan saja yang bersifat

⁸⁷ Ni'matul Huda, *Ilmu Negara*,..., h. 190. ⁸⁸ Ni'matul Huda, *Ilmu Negara*,..., h. 190.

abstrak, dan kedaulatan itu adalah kehendak umum.⁸⁹

Teori kedaulatan rakyat ini juga diikuti oleh Immanuel Kant, yaitu yang mengatakan bahwa tujuan negara itu adalah untuk menegakkan hukum dan menjamin kebebasan daripada para warganya. Dalam hal ini, yang dimaksud kebebasan menurut Kant adalah kebebasan dalam batas-batas perundang-undangan, bahwa yang berhak membuat undang-undang di sini ialah rakyat itu sendiri, jadi rakyatlah yang mewakili kekuasaan tertinggi atau kedaulatan.

2. John Locke

John Locke menyatakan bahwa terbentuknya negara didasarkan pada asas pactum unionis dan pactum subjectionis. Pactum unionis adalah perjanjian antarindividu untuk membentuk negara, sedangkan pactum subjectionis adalah perjanjian antara individu dan negara yang dibentuk. Perjanjian tersebut menentukan bahwa individu memberikan mandat kepada negara atau pemerintah. Mandat rakyat diberikan agar pemerintah mendapat kekuasaan dalam mengelola negara berdasarkan konstitusi yang ditetapkan dalam pactum subjectionis. John locke dalam bukunya two treaties on civil government menyebutkan kekuasaan itu harus dibagi menjadi tiga, yaitu: kekuasaan legislatif, eksekutif, dan federatif. Pa

⁸⁹ Ni'matul Huda, *Ilmu Negara*,..., h. 191.

⁹⁰ Ni'matul Huda, *Ilmu Negara*,..., h. 191.

⁹¹ "teori kedaulatan rakyat" https://id.wikipedia.org/wiki, diakses pada 3 Mei 2016, pukul 10.14 WIB.

⁹² Ahmad zaini, *ilmu politik*, Fakultas Syari'ah Dan Ekonomi Islam IAIN SMH Banten 2013.

3. Mohammad Hatta

Sedangkan menurut Mohammad Hatta, dalam paham Pendidikan Nasional Indonesia (PNI) bahwa kedaulatan rakyat yang dimajukan oleh Pendidikan Nasional Indonesia tidaklah asing bagi masyarakat Indonesia, karena tersusun dari demokrasi asli Indonesia yaitu demokrasi Desa. Pada saat itu, demokrasi Desa tersebut hanya terdapat di pemerintahan Desa saja, sedangkan pemerintahan yang dipakai pada saat itu adalah pemerintahan otokrasi dan feodalisme yang dilakukan oleh raja-raja.

Jadi, di dalam pemerintahan Indonesia yang asli, demokrasi Desa itu hanya terdapat dibawah yaitu di Desa. Sedangkan di dalam pemerintahan yang diatas adalah pemerintahan otokrasi segala peraturan-peraturan negara di buat dan diperintah oleh raja, sehingga raja dapat melakukan hal sewenang-wenangnya yang tidak bisa di kontrol atau di awasi oleh rakyat. Maka dari itu, jika untuk Indonesia merdeka yang menginginkan pemerintahan berdasarkan demokrasi, harus meninggalkan sistem otokrasi atau pemerintahan raja, dan melanjutkan demokrasi asli Indonesia itu menjadi kedaulatan rakyat.

Jelaslah bahwa kedaulatan rakyat yang dipahamkan oleh Pendidikan Nasional Indonesia ini sebenarnya tidkalah asing bagi masyarakat Indonesia, karena tersusun atas demokrasi asli Indonesia yaitu demokrasi Desa yang telah lama ada di Indonesia. Demokrasi asli itu kita hidupkan kembali, tetapi tidak pada tempat yang lama yaitu di Desa saja, melainkan di terapkan pada pemerintahan negara yang lebih luas.

Adapun demokrasi asli yang ada di desa-desa di Indonesia mempunya tiga sifat utama yang harus di pakai sebagai sendi Indonesia merdeka, yaitu: 93

"Pertama: tjita-tjita rapat jang hidup dalam sanubari rakjat Indonesia dari zaman dahulu sampai sekarang dan tidak luput karena tindisan jang pelbagai rupa. Rapat ialah tempat rakjat atau utusan rakjat bermusjawarat dan mupakat tentang segala urusan jang bersangkutan dengan persekutuan hidup dan keperluan bersama. Disini tampaklah dasar demokrasi, pemerintahan rakjat.

Kedua: tjita-tjita massa-protest, jaitu hak rakjat untuk membantah dengan tjara umum segala peraturan negeri jang dipandang tidak adil. Hak ini besar artinja terhadap kepada pemerintahan despotisme atau autokrasi jang tersusun diatas pundak desa demokrasi. Dan demokrasi tidak dapat berlaku, kalau tak ada hak rakjat untuk mengadakan protes bersama. Dalam hak ini tertjantum hak rakjat untuk merdeka bergerak dan merdeka berkumpul.

Ketiga: tjita-tjita tolong-menolong. Sanubari rakjat Indonesia penuh dengan rasa-bersama, kolektivitet. Kalau seseorang di desa hendak membuat rumah atau mengerjakan sawah ataupun ditimpa bala kematian, maka ia tak perlu membajar tukang atau menggaji orang kuli untuk menolong dia. Melainkan ia di tolong oleh orang-orang sedesa. Disini tersimpan dasar perekonomian-ber-kooperasi."

Inilah tiga sendi daripada demokrasi asli Indonesia, jika dasar dari demokrasi asli Indonesia ini di terapkan di pemerintahan Indonesia yang luas ini, maka ia akan menjadi dasar kerakyatan bagi negara Indonesia yang seluas-luasnya yaitu kedaulatan rakyat yang sama seperti paham Pendidikan Nasional Indonesia.

4. Jimly Asshiddiqie

Lazim dipahami bahwa UUD 1945 menganut ajaran kedaulatan rakyat. Hal ini dirumuskan dalam pasal 2 ayat 1 yang menyatakan bahwa "kedaulatan adalah

-

⁹³ Mohammad Hatta, *Kumpulan Karangan Jilid 1*, (Djakarta-Amsterdam-Surabaja: Penerbitan Dan Balai Buku Indonesia, 1953), h. 76.

ditangan rakyat, dan dilakukan sepenuhnya oleh majelis permusyawaratan rakyat". ⁹⁴ Akan tetapi, jika digali lebih mendalam soal pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam UUD 1945, akan tampak bahwa UUD 1945 juga menganut ajaran kedaulatan selain kedaulatan rakyat, yaitu kedaulatan Tuhan. Jika kedaulatan di pahami sebagai konsep kekuasaan tertinggi, maka konsep kekuasaan ke-Maha Kuasaan Tuhan dalam Pembukaan UUD 1945 dipahami juga sebagai konsep kekuassaan tertinggi itu.

Dalam UUD 1945, cita ke-Tuhanan dapat ditemukan dalam 3 rumusan, yaitu dua kali dalam Pembukaan dan satu kali dalam Batang tubuh. Sedangkan kata "agama" dirumuskan dua kali, masing-masing dalam pasal 9 mengenai sumpah jabatan Presiden dan Wakil Presiden, dan pasal 29 ayat 2 tentang kemerdekaan beragama. Karena itu, cita ketuhanan dan keagamaan merupakan dua hal yang erat berkaitan dalam UUD 1945. Dalam rumusan Pancasila yang tercantum pada alinea keempat pembukaan ditegaskan bahwa:⁹⁵

"kemerdekaan kebangsaan Indonesia disusun dalam suatu Undang-Undang Dasar negeri Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat yang berdasar kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia."

⁹⁴ Jimly Asshiddiqie, *Gagasan Kedaulatan Rakyat Dalam Konstitusi Dan Pelaksanaannya Di Indonesia*, (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994), h. 59.

-

⁹⁵ Jimly Asshiddiqie, Gagasan Kedaulatan Rakyat Dalam Konstitusi,...., h. 60.

Demikian pula dalam rumusan batang tubuh UUD 1945, paham ketuhanan ini juga diterapkan pada pasal 29 ayat 1 dengan jaminan kemerdekaan bagi penduduk negara Indonesia untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya masing-masing, juga dalam pasal 9 ditentukan bahwa sebelum memangku jabatan, Presiden dan Wakil Presiden diwajibkan mengucapkan sumpah menurut agamanya didahului dengan kata-kata "Demi Allah, saya bersumpah....". jelas bahwa UUD 1945 mengandung pengakuan yang sangat tegas terhadap cita ketuhanan dan keagamaan bangsa Indonesia dalam konteks kehidupan bernegara.

Sangatlah jelas bahwa UUD 1945 tidak hanya mengandung ajaran kedaulatan rakyat, melainkan juga mengandung ajaran kedaulatan tuhan. Bahkan para ahli Hukum Tata Negara salah satunya Ismail Suny mengemukakan bahwa UUD 1945 menganut ajaran kedaulatan Tuhan, kedaulatan rakyat, dan kedaulatan hukum sekaligus.

Dalam ajaran kedaulatan yang terakhir ini, dapat dilihat dalam rumusan UUD 1945 mengenai "rechtstaat" seperti yang disebut dalam penjelasan umum dan penjelasan BAB IX mengenai kekuasaan kehakiman yang menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merdeka dan terlepas dari pengaruh pemerintahan.

Selain itu, dianutnya ajaran kedaulatan hukum dalam UUD 1945 dapat pula diterangkan secara filosofis dalam hubungannya dengan kedaulatan Tuhan maupun

dengan kedaulatan rakyat. Menurut Ismail Suny, kedaulatan itu pertama-tama dipegang oleh Allah SWT. Dalam kehidupan kenegaraan, kedaulatan Tuhan terwujud dalam kedaulatan rakyat. Rakyatlah yang kemudian memegang dan melaksanakan kedaulatan itu melalui mekanisme kenegaraan. Artinya, kedaulatan rakyat Indonesia berdasarkan UUD 1945 itu, pada hakikatnya adalah penyelenggaraan kedaulatan Tuhan oleh seluruh rakyat yang merupakan hamba-hamba Tuhan. Pelaksanaan perintah-perintah Tuhan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dimusyawarahkan oleh rakyat melalui perantara wakil-wakilnya. permusyawaratan rakyat itu merupakan kesadaran hukum rakyat yang ditetapkan oleh MPR dalam bentuk ketetapan-ketetapannya, dan oleh DPR bersama-sama Presiden dalam bentuk Undang-Undang. Artinya, kedaulatan rakyat itu dalam kenyataannya tercermin dalam produk-produk MPR dan produk kekuasaan legislatif lain yang dijalankan oleh Presiden bersama-sama MPR dengan DPR. Karena itu, secara filosofis, semua TAP MPR dan UU haruslah mencerminkan asas kedaulatan rakyat itu.96

B. Pengertian Kedaulatan Rakyat

Seperti yang sudah dijelaskan di pembahasan sebelumnya bahwa kedaulatan (souvereignty) adalah wewenang tertinggi dari kesatuan politik atau kekuasaan tertinggi. Dalam kamus besar bahasa Indonesia juga dijelaskan bahwa kedaulatan

⁹⁶ Jimly Asshiddiqie, Gagasan Kedaulatan Rakyat Dalam Konstitusi,...., h. 62.

adalah kekuasaan tertinggi atas pemerintahan negara, daerah, dan sebagainya. Pada saat suatu negara terbentuk, negara itu haruslah mempunyai suatu kedaulatan karena agar kedaulatan tersebut dapat mengatur pemerintahan, kehidupan bernegara dan juga kesejahteraan rakyatnya.

Dalam kamus ilmiah, daulat artinya negeri, perintah, kuasa atau pemerintahan negara, kekuasaan, bahagia. 97 Sedangkan kedaulatan artinya hak negara untuk melaksanakan kekuasaan penuh atas status kemerdekaannya tanpa boleh ada campur tangan dari pihak lain terhadap masalah-masalah internal maupun eksternalnya. Sementara itu kedaulatan rakyat dalam kamus ilmiah berarti kekuasaan tertinggi dalam negara ada dalam tangan rakyat seluruhnya. 98 Maka kedaulatan rakyat adalah menyatakan bahwa kekuasaan tertinggi dalam suatu negara berada di tangan rakyat, 99 pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.

Pengertian kedaulatan rakyat ini sama dengan demokrasi yaitu kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat, rakyat yang memerintah, pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Karena pada dasarnya demokrasi lahir dari teori kedaulatan rakyat.

"teori kedaulatan rakyat" https://id.Wikipedia.org/wiki/, diakses pada 27 Agustus 2015, pukul 19.30 WIB.

⁹⁷ Sutan Rajasa, *Kamus Ilmiah Populer* (Surabaya: Karya Utama Surabaya, 2002), h. 100

⁹⁸ Sutan Rajasa, Kamus Ilmiah Populer,..., h. 293

BAB IV

ANALISIS GAGASAN MOHAMMAD HATTA MENGENAI

KEDAULATAN RAKYAT

A. Gagasan Kedaulatan Rakyat Mohammad Hatta

Setelah penulis mencoba membahas tentang gagasan kedaulatan rakyat menurut Mohammad Hatta, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa gagasan kedaulatan rakyat yang ingin Mohammad Hatta kembangkan itu bersifat khas dengan mencakup demokrasi politik dan demokrasi ekonomi sekaligus, dimana keduanya berada diantara paham individualisme dan kolektivisme.

Demokrasi atau kedaulatan rakyat memiliki arti yang sama, yaitu menunjukkan keadaan negara dalam sistem pemerintahannya kedaulatan berada di tangan rakyat, kekuasaan tertinggi berada dalam keputusan bersama rakyat, rakyat yang berkuasa, pemerintahan rakyat dan kekuasaan oleh rakyat.

Gagasan kedaulatan rakyat ini sebagai cita kenegaraan memiliki latar belakang sejarah yang panjang. Diskusi dan perdebatan mengenai kedaulatan rakyat sudah berkembang di kalangan kaum intelek Indonesia, seperti Soekarno dan Hatta. Oleh para tokoh ini, dalam masa perjuangan, gagasan kedaulatan rakyat disebarluaskan ke masyarakat. Hatta bahkan memimpin beberapa rekannya yang lain

_

¹⁰⁰ Ahmad Zaini, *Ilmu Politik*, (Serang: Fakultas Syari'ah Dan Ekonomi Islam IAIN "Sultan Maulana Hasanuddin" Banten, 2013), h. 81

untuk menerbitkan tabloid khusus sepuluh harian bernama Daoelat Ra'jat sejak tahun 1931. Dalam tabloid ini, Hatta menuangkan pikirannya bahwa Indonesia merdeka yang akan dibangun haruslah berdasar kepada kedaulatan rakyat. Namun kedaulatan yang dimaksud berbeda dengan kedaulatan rakyat yang berkembang di negara Barat ketika itu yang didasarkan atas paham individualisme dan liberalisme.

Dalam kerakyatan yang di pahamkan oleh Pendidikan Nasional Indonesia (PNI) sebagai asas daripada cita-cita kerakyatan berbeda dengan demokrasi Barat. Asas tersebut adalah:

"asas kerakjatan mengandung arti, bahwa kedaulatan ada pada rakjat. Segala hukum (rect, peraturan-peraturan negeri) haruslah bersandar pada perasaan keadilan dan kebenaran jang hidup dalam hati rakjat jang banjak, dan aturan penghidupan haruslah sempurna dan berbahagia bagi rakjat kalau ia beralasan kedaulatan rakjat. Asas kedaulatan rakjat inilah yang mendjadi sendi pengakuan oleh segala djenis manusia jang beradab, bahwa tiap-tiap bangsa mempunjai hak untuk menentukan nasib sendiri "101

Inilah dasar kerakyatan Pendidikan Nasional Indonesia agar tercapai masyarakat yang berdasarkan keadilan dan kebenaran, maka rakyat yang mengatur pemerintahan negara, menyusun perekonomian negara dan semuanya diputuskan oleh rakyat dengan mufakat. Rakyat berdaulat dan rakyat pula yang menentukan atas nasib dirinya sendiri, bukan lagi orang yang berkuasa yang menentukan nasib rakyat tetapi rakyat sendiri yang menentukan nasibnya. Inilah arti dari kedaulatan rakyat, suatu dasar dari demokrasi. Tidak hanya dalam hal politik saja, melainkan dalam hal perekonomoan dan sosial.

Mohammad Hatta, Kumpulan Karangan Jilid 1, (Djakarta-Amsterdam-Surabaja: Penerbitan Dan Balai Buku Indonesia, 1953), h. 66.

Hatta melihat pada pandangan Montesquieu tentang demokrasi, ia mengatakan bahwa pemerintahan demokrasi tidak dapat diberlakukan cepat seperti pemerintahan otokrasi dan oligarki. Meskipun begitu, pemerintahan demokrasi lebih baik dari pada pemerintahan otokrasi dan oligarki, dimana pemerintahan otokrasi ataupun oligarki dapat menimbulkan ketidakadilan atas peraturan-peraturan yang dibuat oleh pemimpin negara atau raja. Berbeda dengan demokrasi, dalam demokrasi tidak ada kekerasan ataupun ketidakadilan, karena dalam pemerintahan demokrasi rakyat memerintah dirinya sendiri.

Montesquieu juga membagi kekuasaan negara menjadi tiga kekuasaan, yaitu:

"Pertama, kekuasaan jang memperbuat hukum negeri. Kedua, kekuasaan jang mendjalankan peraturan-peraturan jang diperbuat. Ketiga, kekuasaan jang mendjaga, supaja hukum negeri itu tidak dilanggar orang. Kekuasaan jang pertama ada pada dewan rakjat; kekuasaan kedua pada pemerintah; dan kekuasaan jang ketiga dilakukan oleh hakim, jang lepas dari pengaruh dewan rakjat dan pemerintah." ¹⁰²

Dalam suatu negeri itu pemerintahan rakyat atau demokrasi dilakukan oleh banayak orang. Undang-undang negara diputuskan dengan cara rapat negeri yang dikunjungi oleh masyarakat negeri yang telah dewasa. Demikian juga dengan pengadilan dilakukan oleh rakyat. Dapat dilihat dari keadaan seperti ini dimana kekuasaan membuat hukum negeri dan kekuasaan kehakiman ada pada tangan rakyat. Yang sedemikian dapat langsung, karena pada saat itu kekuasaan pemerintahan tidak begitu luas dan juga tidak begitu banyak penduduk.

_

¹⁰² Mohammad Hatta, Kumpulan Karangan Jilid 1,...., h. 67.

Akan tetapi pada masa sekarang demokrasi atau pemerintahan rakyat dilakukan dengan jalan perwakilan. Rakyat yang banyak ini memilih wakil-wakilnya pada waktu yang di tentukan untuk mengikuti sidang atau rapat dalam dewan rakyat. Jadi, pemerintahan sekarang dilakukan dengan perantara dewan rakyat dan parlemen.

Dalam dasar demokrasi, pemerintah dapat berdiri jika diakui oleh parlemen. Jika suatu pemerintah tidak dapat dipercayai oleh parlemen, pemerintahannya tidak dapat bertahan lama, maka dewan rakyat dapat membubarkannya setiap waktu dengan menerima ketidak percayaan atau menolak *begroting* yang dipertimbangkan oleh pemerintah. Jika pemerintahan itu yang dijatuhkan menyangka bahwa dewan rakyat itu tidak lagi sesuai dengan kemauan rakyat, maka pemerintah itu berhak untuk membubarkan dewan rakyat dan dapat mengadakan pemilihan baru yang sesuai dengan keinginan rakyat. Jika rakyat yang memilih itu mengutus kembali wakil dewan rakyat yang dahulu ke dalam dewan rakyat yang baru, maka pemerinahan yang lama harus mundur dan digantikan dengan pemerintahan yang baru.

Jadinya, dalam perjuangan antara parlemen dan pemerintah, yang kemudian ini hanya boleh membubarkan satu kali saja untuk dapat meduga kemauan rakyat. Pemerintah harus mundur jika sikap dewan rakyat disetujui oleh rakyat yang memilih. Oleh sebab itu, menurut dasar demokrasi sekarang keputusan yang paling tinggi dalam urusan pemerintahan ada pada rakyat dengan perantara dewan perwakilannya, maka pemerintahan semacam itu dapat disebut dengan pemerintahan rakyat. Demokrasi adalah pemerintahan rakyat.

Meurut dasar demokrasi, hak rakyat dalam menentukan nasibnya sendiri tidak hanya berada di pemerintahan negeri saja, melainkan juga pada tiap tempat, seperti kota, desa dan daerah. Setiap wilayah itu mempunyai badan perwakilannya sendiri. dengan demikian, setiap bagian pemerintahan rakyat yang berada di daerah, desa maupun kota dapat menjalankan dan membuat peraturan-peraturannya sendiri dan juga dapat menjalankan peraturan-peraturan yang dibuat oleh dewan rakyat yang lebih tinggi. Jadi, bukan hanya pemerintah atau golongan orang saja yang mempunyai hak untuk menentukan nasibnya sendiri, melainkan rakyat umum seluruhnya mempunyai hak yang sama baik di setiap bagian negara, wilayah dan daerah atau bahkan bagian wilayah kecil dari suatu daerah.

Dalam sejarah negara-negara Barat, ide demokrasi atau kedaulatan rakyat itu sendiri memang cenderung berkembang secara timpang dalam arti hanya menekankan aspek politiknya saja. 103 Rakyat cenderung dipahami dengan berdaulat dalam bidang politiknya saja, sedangkan dalam bidang ekonomi di pegang oleh prinsip kapitalis. Prinsip inilah yang menurut Mohammad Hatta dalam tulisannya di tabloid Daulat Ra'jat pada tahun 1931, menyebabkan perkembangan demokrasi menjadi timpang dan "tidak senonoh", 104 karena yang berlaku hanya kedaulatan rakyat di bidang politik saja, sedangkan di bidang ekonomi yang berdaulat adalah

Sri-Edi Swasono, Bung Hatta: Bapak Kedaulatan Rakyat,..., h. 94.
 Sri-Edi Swasono, Bung Hatta: Bapak Kedaulatan Rakyat,..., h. 95.

golongan pemilik modal. 105

Pemerintahan raja yang berdasar otokrasi, ditunjang oleh kaum ningrat, itulah yang dinamai dengan pemerintahan feodalisme. Kemudian pemerintahan feodalisme itu mendapat bentuk kekuasaan bagi kaum ningrat, daerah mereka masing-masing yang diakui oleh raja dan mereka diberi suara dalam urusan staat melaluin perantara dewan perwakilan ningrat. Kemudian kekuasaan raja atau otokrasi raja mulai dibatasi oleh kaum ningrat yang menjadi "basero" dalam pemerintahan negeri. Oleh karena itu, pemerintahan raja berada diatas, dan rakyat tidak mempunyai suara sedikitpun dalam urusan negara dan mereka tidak bisa menentukan nasibnya sendiri dan hanya mendapatkan perintah saja dari raja.

Pemerintahan negeri yang berbentuk kerajaan atau otokrasi tentu saja tidak akan bertahan lama, lambat laun pasti akan mendapatkan perlawanan dari rakyat. Kemudian muncullah semangat individualisme yang menyadarkan banyak orang akan harga dirinya. Setiap orang lahir merdeka dan hidup merdeka, maka dari itu tidaklah jika kehidupannya itu terikat dan tertindas. Di atas dasar individulisme inilah JJ Rousseau mengembangkan cita-cita *volkssouvereiniteit*, kedaulatan rakyat. Cita-cita itulah yang menjadi pedoman pergerakan besar di tahun1789, yang meruntuhkan kekuasaan feodalisme. Setelah itu muncuulah masyarakat baru yang menuju "kemerdekaan, persamaan, dan persaudaraan..." sekurang-kurangnya dalam teori.

¹⁰⁵ Zulfikri Suleman, *Demokrasi Untuk Indonesia: Pemikiran Politik Bung Hatta*, (Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2010), h. 145

Sebab itu, revolusi Perancis dijunjung tinggi oleh orang Barat, sebagai sumber demokrasi sekarang.¹⁰⁶

Demokrasi Barat ini memakai dasar sama rata sama rasa. Hak orang kaya dan orang miskin disamakan, hak buruh dan petani tidak berbeda lagi dengan hak orang bangsawan atau kaum ningrat. Sekarang tidak lagi kaum ningrat saja yang boleh bersuara dalam urusan pemerintahan, melainkan rakyat juga mempunyai hak bersuara dengan melalui perantaraan dewan perwakilan rakyat.

Nyatalah bahwa semangat individualisme lahir untuk memecah belenggu pergaulan hidup dan meruntuhkan kerajaan feodalisme serta memberikan kemerdekaan kepada orang-orang untuk menentukan nasibnya sendiri. Di atas dasar individualisme itulah berdiri demokrasi Barat dan inilah sebab utama "pincangnya" demokrasi Barat. Karena di dalam demokrasi Barat hanya terdapat hal politik dan hak saja, dalam hal perekonomian dan pergaulan sosial masih berlaku otokrasi. Dimana golongan kecil kapitalisme masih menjajah masyarakat banyak.

Dalam semangat individualisme memakai semboyan "laissez faire, laissez passer" yang artinya merdeka berbuat dan merdeka berjalan.

Kaum bermodal atau kapital bergabung dan membuat perusahaan besar, perusahaan tangan ditukar dengan perusahaan mesin. Kemudian orang-orang tidak cukup lagi mempunyai modal untuk mendirikan pabrik sendiri, karena kaum kapitalis

¹⁰⁶ Mohammad Hatta, *Kedaulatan Rakyat, Otonomi Dan Demokrasi*, (Bantul: Kreasi Wacana, 2014), h. 30.

yang berserikat. Karena kapitalisme hanya mencari untung besar dan ingin terbebas dari bersaing, maka dari itu muncullah saling tindas-menindas, bunuh-membunuh, dan meenurunkan harga agar pabrik saingannya melemah dan bangkrut, kemudian seluruh keuntungan jatuh kepada kaum kapitalis.

Jadi inilah buah dari cita-cita individualisme pada abad ke-19, yang tidak di niatkan sama sekali oleh para ahli dan para tokoh bahkan Mohammad Hatta sekalipun untuk menerapkan demokrasi Barat di Indonesia. Karena sama saja, seperti rakyat yang sudah merdeka atas hak berpolitiknya akan tetapi masih terjajah oleh ekonomi kapitalis.

Jadinya demokrasi Barat yang dilahirkan oleh revolusi Perancis ini tidak membawa kemerdekaan yang sebenarnya kepada rakyat, melainkan menimbulkan kekuasaan kapitalisme. Sebab itu, demokrasi politik saja tidak cukup untuk mencapai demokrasi yang sebenarnya, yaitu kedaulatan rakyat. Haruslah ada pula demokrasi ekonomi yang memakai dasar bahwa:

"segala penghasilan jang mengenai penghidupan orang banjak harus berlaku dibawah tanggungan orang banjak pula"¹⁰⁷

Volkssouvereiniteit yang dianjurka oleh Rousseau menyimpang jalannya dan tidak memmbawa kedaulatan kepada rakyat, karena ia berdasarkan kepada individualisme. Bahwa keterangan di atas cukup memberi bukti jika semangat individualisme itu tidak sesuai dengan cita-cita kedaulatan rakyat, yaitu rakyat

_

¹⁰⁷ Mohammad Hatta, *Kumpulan Karangan Jilid 1*,...., h. 73.

sebagai raja yang menentukan nasibnya sendiri. bagaimana pemerintahan negeri harus dijalankan dan bagaimana caranya rakyat hidup, semuanya itu harus merupakan keputusan rakyat atas dasar mufakat.

Maka dari itu kedaulatan yang dikemukakan oleh Rousseau yang hanya demokrasi politik saja tidak terpakai dalam paham Pendidikan Nasional Indonesia. Dalam "daulat rakyat" no 1 pada kata pendahuluan tertulis: "kita mengetahui bagaimana sifat perorangan Barat itu (individualisme) merusak pergaulan hidup, memutar asas yang baik seperti kedaulatan rakyat menjadi alat pemakan rakyat." ¹⁰⁸

Jadi kita bisa lihat bahwa perbedaan antara *volkssouvereiniteit* yang di kemukakan oleh Rousseau dengan kedaulatan rakyat paham Pendidikan Nasional Indonesia adalah perbedaan asas. Yang pertama bersendi kepada semangat individualisme, dan yang kedua bersendi kepada rasa kebersamaan atau *kolektivitet*. Bagi Pendidikan Nasional Indonesia, kerakyatan tidak saja dalam pergaulan politik, melainkan juga dalam urusan ekonomi dan sosial. Rakyat harus diberi pengertian yang seluas-luasnya, yaitu berhak menyusun pemerintahannya sendiri dan mengatur ekonominya sendiri.

Sungguhpun kedaulatan rakyat yang di majukan oleh Pendidikan Nasional Indonesia itu baru, namun sebenarnya tidak asing bagi rakyat Indonesia, karena citacita kedaulatan rakyat ini tersusun atas demokrasi yang telah ada di Indonesia sejak dahulu, yaitu demokrasi desa.

-

¹⁰⁸ Mohammad Hatta, Demokrasi Kita: Pikiran-Pikiran Tentang,...., h. 34.

Hatta menyimpulkan bahwa pemerintahan demokrasi yang ada di Indonesia hanya terdapat di lingkungan desa saja atau dipemerintahan desa, yaitu desa demokrasi, di sini segala hal menjadi urusan bersama. Jika diperhatikan lagi, alam Indonesia di masa lalu, pemerintahannya adalah otokrasi dan feodalisme, bukan demokrasi. Otokrasi dan feodalisme ini dilakukan oleh pemerintahan raja-raja, pemerintahan yang seperti inilah yang dapat mencelakakan rakyat, sehingga perekonomian rakyat dikuasai oleh kaum kapital dan sampai Indonesia diperintah oleh bangsa asing. Demokrasi Indonesia juga mempunyai dasar yang baik, akan tetapi tidak dapat berkembang dalam pemerintahan, karena dipundaknya terdapat otokrasi dan feodalisme.

Jadi jelaslah pada masa dahulu demokrasi hanya ada di dalam pemerintahan desa saja, bukan pada pemerintahan negeri. Di atas pemerintahan desa berdiri daulat tuanku, yang melakukan perintah sewenang-wenang yang tidak dapat di kontrol oleh rakyat. Maka dari itu Hatta menyatakan jika Indonesia merdeka ingin mendapatkan pemerintahan berdasarkan demokrasi, kita harus meninggalkan pemerintahan otokrasi dan feodalisme dan menggantinya dengan pemerintahan demokrasi dan melanjutkannya menjadi kedaulatan rakyat. Agar terdapat suatu peraturan pemerintahan rakyat untuk Indonesia.

Dalam mewujudkan Indonesia merdeka, Hatta ingin mewujudkan pemerintahan Indonesia yang berdasarkan demokrasi sama seperti yang telah ada di dalam pergaulan masyarakat asli Indonesia. Dalam tulisannya, yang berjudul

Indonesie Vrij, terbit pada tahun 1928, Hatta menyebutkan ada 3 sendi yang akan di pakai untuk Indonesia merdeka, yaitu:¹⁰⁹

"Pertama: tjita-tjita rapat jang hidup dalam sanubari rakjat Indonesia dari zaman dahulu sampai sekarang dan tak luput karena tindisan jang pelbagai rupa. Kedua: tjita-tjita massa-protest, jaitu rakjat untuk membantah dengan tjara umum segala peraturan negeri jang di pandang tidak adil. Inilah jang mendjadi dasar tuntutan kita, supaja mendapat kemerdekaan bergerak dan berkumpul bagi rakjat. Ketiga: tjita-tjita tolong-menolong. Sebab itulah, maka semendjak tahun 1925 kita tidak puas membuat propaganda untuk kooperasi, sebagai dasar perekonomian Indonesia."

Dasar-dasar demokrasi yang terdapat dalam pergaulan hidup masyarakat Indonesia inilah yang dijadikan sebagai sendi politik negara kita. Supaya tercapai masyarakat yang berdasar keadilan dan kerakyatan haruslah rakyat sadar akan hakhaknya dan rakyat juga berhak menentukan nasibnya sendiri dengan cara rakyat mengatur pemerintahan negara, menyusun perekonomian negara, semuanya harus diputuskan oleh rakyat dengan cara mufakat. Rakyat berdaulat atas dirinya, tidak ada lagi sekelompok orang atau golongan orang yang mengatur nasib rakyat, karena rakyatlah yang menentukan nasibnya sendiri dan nasib negara. Menurut Mohammad Hatta inilah arti daripada kedaulatan rakyat, suatu dasar demokrasi atau kerakyatan yang seluas-luasnya. Tidak saja dalam hal politik, melainkan dalam hal perekonomian dan sosial haruslah ada demokrasi dengan keputusan secara mufakat.

Inilah tiga sendi dari demokrasi asli Indonesia, jika dasar lingkungan pemerintahannya diluaskan dan disesuaikan dengan kemajuan zaman, ia akan menjadi dasar kerakyatan yang seluas-luasnya yaitu kedaulatan rakyat sama seperti

-

¹⁰⁹ Mohammad Hatta, *Kumpulan Karangan Jilid 1*,..., h. 81.

paham Pendidikan Nasional Indonesia.

Diatas sendi yang pertama dan yang kedua, dapat di dirikan tiang-tiang politik dari demokrasi yang sebenarnya yaitu suatu pemerintahan yang dilakukan oleh rakyat melalui perantaraan wakil-wakilnya atau dewan perwakilan, sedangkan yang menjalankan kekuasaan pemerintahan harus takluk kepada keinginan rakyat. Untuk menyusun keinginan rakyat, ia mempunyai hak yang tak boleh dihilangkan, yaitu hak merdeka bersuara, berserikat dan berkumpul.

Dalam sendi ketiga, dapat di dirikan tonggak demokrasi ekonomi. Tidak ada lagi golongan kecil masyarakat yang menguasai penghidupan orang-orang, melainkan keinginan dan keprluan rakyat yang menjadi acuan perusahaan dan penghasilan. Sebab itu, untuk penghasilan yang banyak ini yang mengenai penghidupan rakyat harus berdasar kepada milik bersama dan terletak dibawah pengawasan rakyat dengan perantaraan badan-badan perwakilannya. Sebab itu juga tidak lagi untung yang menjadi fokus utama, melainkan kemakmuran rakyat.

Jelaslah bahwa gagasan kedaulatan rakyat yang ingin dikembangkan oleh Mohammad Hatta ini adalah demokrasi politik dan ekonomi sekaligus yang menjadi syarat bagi masyarakat yang berdasar keadilan dan kebenaran yang menyempurnakan cita-cita bahwa setiap rakyat berhak untuk menentukan nasibnya sendiri. bukan saja rakyat dalam golongan besar sebagai bangsa, melainkan rakyat dalam golongan kecilpun berhak mempunyai hak itu. Sebab itu, demokrasi yang sebenarnya memakai

sifat desentralisasi yang memberikan hak otonomi kepada golongan-golongan dibawah dalam hak politik dan ekonomi.

Agar perkembangan gagasan kedaulatan rakyat tidak berjalan timpang atau "tidak senonoh" itulah maka pemahamannya dalam rangka Indonesia merdeka harus diluruskan. Kedaulatan rakyat Indonesia merdeka haruslah mencakup, baik di bidang politik maupun di bidang ekonomi. Konsepsi Hatta inilah yang kemudian dipertegas oleh Bung Karno pada tahun 1932 dengan istilah demokrasi politik dan demokrasi ekonomi. ¹¹⁰

Ketika Bung Hatta merenungkan kembali arus perjalanan pemikiran demokrasi sosial yang dialaminya. Ia sampai juga pada suatu kesimpulan bahwa citacita ini berasal dari tiga sumber. Ketiga sumber itu ialah: *Pertama*, paham sosialisme barat, "karena dasar perikemanusiaan yang dibelanya". *Kedua*, ajaran Islam "yang menuntut kebenaran dan keadilan Illahi dalam masyarakat serta persaudaraan antara manusia sebagai makhluk tuhan". *Ketiga*, "pengetahuan bahwa masyarakat Indonesia berdasarkan *kolektivisme*". ¹¹¹ Paduan semuanya itu hanya memperkuat keyakinan, bahwa bangunan demokrasi yang akan menjadi dasar pemerintah Indonesia di kemudian hari haruslah suatu perkembangan daripada demokrasi asli yang berlaku di dalam desa Indonesia. ¹¹²

¹¹⁰ Sri-Edi Swasono, *Bung Hatta: Bapak Kedaulatan Rakyat,...*, h. 95.

Mohammad Hatta, *Untuk Negeriku: Bukittinggi-Rotterdam Lewat Betawi*, (Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2011), h. XXXIX

¹¹² Mohammad Hatta, *Demokrasi Kita: Pikiran-Pikiran Tentang*,...., h. 104.

Dengan demikian, menurut Hatta, masyarakat asli Indonesia di berbagai Nusantara di masa lalu memiliki lima ciri kehidupan yang sudah mentradisi atau sudah menjadi kebiasaan secara turun-temurun, yang oleh Hatta di istilahkan *indak lakang dek paneh, indak lapuak dek ujan (kuat bertahan menghadapi perubahan zaman)*. Kelima ciri itu adalah mencerminkan kebersamaan dan nilai-nilai demokrasi disemua aspek kehidupan, politik, ekonomi, dan sosial.

B. Relevansi Konsep Kedaulatan Rakyat Mohammad Hatta Dengan Demokrasi Dalam Konteks Negara Indonesia

Dalam pembahasan mengenai pemikiran kenegaraan mengenai "souvereignty" sebagai konsep kekuasaan tertinggi, Hatta mengganti bahasanya menggunakan istilah "kedaulatan" untuk pengertian yang sama. Para intelektual yang aktif dalam perjuangan kemerdekaan dulu, seperti Bung Karno dan Bung Hatta aktif mendiskusikan konsep "souvereignty" yang biasa dibahas dalam filsafat hukum dan politik itu. Salah satu topik perbincangan penting dalam soal ini adalah gagasan kedaulatan rakyat (people's souvereignty) yang sejalan dengan pengertian kata "democracy" yang berasal dari kata "demos" yang berarti rakyat dan "cratos" atau "cratein" yang berarti kekuasaan dalah kata kedaulatan.

Bahwa demokrasi ataupun kedaulatan rakyat berarti kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat, dimana suatu keadaan negara itu diperinah oleh rakyat melalui perantara wakil-wakil rakyat yang dipilih langsung oleh rakyat.

-

¹¹³ Sri-Edi Swasono, *Bung Hatta: Bapak Kedaulatan Rakyat*,..., h. 88.

Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, bahwa gagasan kedaulatan rakyat yang ingin dikembangkan oleh Mohammad Hatta adalah kedaulatan rakyat yang mempunyai ciri yang khas yang mencakup demokrasi politik dan ekonomi sekaligus yang mana di antara keduanya berada dalam paham individualisme dan kolektivisme.

Hatta mengemukakan kolektivisme atau kebersamaan dalam masyarakat asli Indonesia melahirka tiga ciri, yaitu: rapat atau musyawarah, mufakat, dan tolongmenolong. Dua ciri pertama ini berhubungan dengan cara-cara pengambilan keputusan mengenai kepentingan bersama, dan ciri yang ketiga adalah berhubungan dengan cara mengatasi masalah bersama.

Dalam hubungannya dengan kebutuhan untuk membangun Indonesia merdeka yang berkedaulatan rakyat, Hatta mengemukakan tradisi rapat atau musyawarah untuk mencapai mufakat menjadi sendi untuk mengembangkan tatanan demokrasi politik, yaitu dalam kehidupan bersama di tingkat yang lebih tinggi, seperti kecamatan, kabupaten, provinsi dan seterusnya sampai ke tingkat nasional. Mekanisme rapat atau musyawarah untuk mencapai mufakat tetap dapat dilakukan, akan tetapi karena kehidupan di tingkat atas ini melibatkan banyak orang, sehingga hanya dapat dilakukan oleh anggota-anggota yang duduk di dalam lembaga-lembaga perwakilan. Anggota-anggota perwakilan rakyat ini harus dipilih secara demokrastis oleh rakyat dan benar-benar mencerminkan kedaulatan rakyat. Dengan

¹¹⁴ Zulfikri Suleman, *Demokrasi Untuk Indonesia*,...., h. 188.

kata lain, Hatta menginginkan sifat demokratis masyarakat asli Indonesia dapat ditiru dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dengan penyesuaian seperlunya tanpa menghilangkan substansinya yaitu asas kedaulatan rakyat.

Kemudian Hatta mengemukakan ciri yang ketiga dari masyarakat asli Indonesia, yaitu tradisi tolong-menolong atau gotong-royong, menjadi sendi untuk mengembangkan demokrasi ekonomi melalui koperasi. Hatta menambahkan tujuan dibentuknya koperasi adalah untuk mencukupi kebutuhan bersama, bukan untuk mencari keuntungan seperti yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan swasta. Tujuan utama dari koperasi yang Hatta kemukakan adalah untuk menanamkan ke dalam jiwa anggota-anggotanya semangat solidaritas dan individualitas yaitu kesadaran tentang pentingnya harga diri. Pada akhirnya, koperasi juga berkembang untuk kepentingan umum, tidak hanya untuk anggota-anggotanya saja.

Selain dari ketiga ciri yang telah dikemukakan Hatta, Hatta menaambahkan dua ciri masyarakat asli Indonesia yaitu pertama kebiasaan melakukan protes bersama terhadap peraturan penguasa yang dianggap tidak adil atau memberatkan rakyat. Kedua adalah kebiasaan menyingkir dari daerah kekuasaan penguasa yang dianggap lalim.

Maka pemikiran kedaulatan rakyat Mohammad Hatta inilah yang menjadi dasar demokrasi negara Indonesia, terbukti banyak pemikiran Mohammad Hatta yang dituangkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Akan tetapi pada perkembangannya

_

¹¹⁵ Zulfikri Suleman, *Demokrasi Untuk Indonesia*,..., h. 188.

demokrasi Indonesia banyak mengalami perubahan setelah kemerdekaan Indonesia.

Sejak Indonesia merdeka dan berdaulat sebagai sebuah negara pada tanggal 17 Agustus 1945, para Pendiri Negara Indonesia (*the Founding Fathers*) melalui UUD 1945 telah menetapkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menganut paham atau ajaran demokrasi, dimana kedaulatan berada ditangan Rakyat dan dilaksanakan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Dengan demikian berarti juga negara Indonesia tergolong sebagai negara yang menganut paham Demokrasi Perwakilan (*Representative Democracy*). ¹¹⁶

Pada periode 1945-1959, demokrasi pada masa ini disebut dengan demokrasi Parlementer. Sistem Parlementer ini mulai berlaku sebulan setelah kemerdekaan Indonesia. Namun, sistem Parlementer ini di nilai kurang cocok dengan negara Indonesia karena lemahnya budaya demokrasi dan mempraktikan demokrasi model Barat ini telah memberikan peluang sangat besar kepada partai-partai politik untuk mendominasi kehidupan sosial politik. Akibatnya banyak faksi-faksi partai politik yang bersaing tidak sehat dan pemberontakan daerah terhadap pemerintahan pusat telah mengancam berjalannya demokrasi itu sendiri.

Pada akhirnya, selain faktor-faktor di atas, kegagalan partai-partai dalam majelis konstituante untuk mencapai konsensus mengenai dasar negara untuk Undang-Undang Dasar baru, menodorong presiden sukarno untuk mengeluarkan

_

¹¹⁶ Sistem Demokrasi Di Indonesia_Myown.Html, Diunduh Pada 13 Mei 2016, Pukul 08.48 WIB.

dekrit presiden pada 5 Juli 1959 yang menegaskan berlakunya Undang-Undang Dasar 1945, kemudian berakhirlah sistem demokrasi Parlementer dan diganti dengan demokrasi terpimpin yang memosisikan presiden Soekarno sebagai pusat kekuasaan negara.

Kemudian pada periode 1959-1965 dikenal dengan sebutan demokrasi Terpimpin. Demokrasi ini mendominasi politik Presiden dan berkembangnya pengaruh Komunis dan peranan tentara dalam panggung politik. Hal ini disebabkan dikeluarkannya Dekrit Presiden pada 5 Juli 1959 untuk mencegah perpecahannya NKRI.

Kepemimpinan Presiden tanpa batas ini terbukti melahirkan tindakan dan kebijakan yang menyimpang dari ketentuan-ketentuan Undang-Undang Dasar 1945. Misalnya pada 1950 Presiden Soekarno membubarkan dewan perwakilan rakyat hasil pemilihan umum, padahal dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 Presiden tidak berwenang untuk berbuat yang demikian itu. kemudian dalam kehidupan politik, peran partai Komunis Indonesia sangat menonjol, karena kedekatan Soekarno dan Partai Komunis Indonesia. Kemudian, kehidupan kenegaraan Indonesia kembali terancam akibat dari konfil politik dan ideologi yang berujung pada peristiwa berdarah yaitu gerakan 30 September 1965 atau sering disebut dengan G.30.S/PKI.

Pada periode 1965-1998 merupakan periode pemerintahan Presiden Soeharto dengan pemerintahan Orde Barunya. Disebut Orde Baru karena merupakan kritik

terhadap periode sebelumnya, sebagaimana dijelaskan bahwa periode Orde Baru merupakan upaya untuk meluruskan kembali penyelewengan terhadap Undang-Undang Dasar 1945 yang terjadi dalam masa pemerintahan demokrasi terpimpin. Seiring pergantian kepemimpinan Nasional, demokrasi terpimpin yang cetuskan oleh Presiden Soekarno telah diganti oleh elit Orde Baru dengan demokrasi Pancasila.

Demokrasi Pancasila secara garis besar menawarkan tiga komponen demokrasi, yaitu: *Pertama*, demokrasi dalam bidang politik pada hakikatnya adalah menegakkan kembali asas-asas negara hukum dan kepastian hukum. *Kedua*, demokrasi dalam bidang ekonomi pada hakikatnya adalah kehidupan yang layak bagi semua warga negara. *Ketiga*, demokrasi dalam bidang hukum pada hakikatnya bahwa pengakuan dan perlindungan HAM, peradilan yang bebas dan tidak memihak.¹¹⁷

Namun pada pelaksanaannya, demokrasi yang dikampanyekan oleh Orde Baru baru sebatas retorika politik belaka. Dalam pelaksanaan dan pemerintahannya, penguasa Orde Baru bertindak jauh dari prinsip-prinsip demokrasi.

Periode pasca Orde Baru sering disebut juga dengan era Reformasi. Periode ini erat hubungannya dengan gerakan rakyat yang menuntut pelaksanaan demokrasi dan HAM secara konsekuen. Tuntutan ini ditandai dengan lengsernya Presiden Soeharto dari tampun kekuasaan Orde Baru pada Mei 1998, setelah lebih dari tiga puluh tahun berkuasa dengan demokrasi pancasilanya itu.

¹¹⁷ A. Ubaedillah Dan Abdul Rozak, *Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education) Demokrasi: Hak Asasi Manusia Dan Masyarakat Madani*, (Jakarta: Uin Syarif Hidayatullah, Kencana Penada Media, 2011), Edisi Ketiga h. 45.

Bercermin pada pengalaman manipulasi atas pancasila oleh penguasa orde baru, demokrasi yang hendak dikembangkan oleh rezim orde baru adalah demokrasi tanpa nama atau demokrasi tanpa embel-embel di mana hak rakyat merupakan komponen inti dalam mekanisme dan pelaksanaan pemerintahan yang demokratis.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian diatas, dalam bab terakhir ini penulis mencoba menarik kesimpulan sebagai berikut:

- Gagasan kedaulatan rakyat yang ingin dikembangkan oleh Mohammad Hatta adalah demokrasi yang bercorak politik dan ekonomi sekaligus, dimana keduanya berada diantara paham individualisme dan kolektivisme yang berasal dari sosial politik masyarakat asli Indonesia.
- Relevansi kedaulatan rakyat Mohammad Hatta dengan demokrasi dalam konteks negara Indonesia adalah kedaulatan rakyat Mohammad Hatta sebagai dasar daripada demokrasi Indonesia yang tertuang dalam UUD 1945.

B. Saran-saran

- Pemerintah, hendaknya menerapkan konsep kedaulatan rakyat menurut Mohammad Hatta, yaitu demokrasi asli Indonesia karena konsep ini selaras dengan azas musyawarah mufakat yang di anut bangsa Indonesia. Dengan menerapkan azas kedaulatan rakyat dalam pemerintahan, rakyat akan terpenuhi hak-haknya sebagai warga negara Indonesia.
- 2. Kepada para akademisi, terus melakukan kajian pemikiran-pemikiran para tokoh mengenai kenegaraan, khususnya mengkaji pemikiran para tokoh

Indonesia mengenai kenegaraan, agar bisa kita ambil manfaatnya untuk keberlangsungan kehidupan Negara dan Bangsa.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfarizi, Salman, Mohammad Hatta: Biografi Singkat (1902-1980), Jogjakarta: Garasi. 2009.
- Al-mawardi, Imam, *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah: Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara Dalam Syariat Islam*, Bekasi: PT Darul Falah. 2012.
- Anwar, Abbas, Bung Hatta dan Ekonomi Islam "Menangkap Makna Maqashid al Syari'ah", Jakarta: Kompas. 2010.
- Asshiddiqie, Jimly, Gagasan Kedaulatan Rakyat Dalam Konstitusi Dan Pelaksanaannya Di Indonesia, Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve. 1994.
- Budiadjo, Miriam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. 2008.
- Effendi, Sulaiman, Kiprah Dan Pemikiran Politik Tokoh-Tokoh Bangsa, Jogjakarta: Ircisod. 2014.
- Fuady, Munir, Konsep Negara Demokrasi, Bandung: PT. Refika Aditama. 2010.
- Hatta, Mohammad, *Demokrasi Kita: Pikiran-Pikiran Tentang Demokrasi Dan Kedaulatan Rakyat*, Bandung: Sega Arsy. 2014.
- Hatta, Mohammad, *Indonesia Merdeka*, Jakara: Bulan Bintang.. 1976.
- Hatta, Mohammad, Kedaulatan Rakyat, Otonomi dan Demokrasi, Bantul: Kreasi Wacana. 2014.
- Hatta, Mohammad, *Untuk Negeriku: Bukittinggi-Rotterdam Lewat Betawi*, Jakarta: PT Kompas Media Nusantara. 2011.
- _______, *Untuk Negeriku: Menuju Gerbang Kemerdekaan*, Jakarta: PT Kompas Media Nusantara. 2011.
- Hatta, Mohammad, *Kumpulan Karangan Jilid 1*, Djakarta-Amsterdam-Surabaja: Penerbitan Dan Balai Buku Indonesia. 1953.
- Huda, Ni'matul, *Ilmu Negara*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada. 2013.
- Imran, Amin, Mohammad Hatta, Jakarta: Mutiara Sumber Widya. 1984.
- Kurzman, Charles, Wacana Islam Liberal: Pemikirn Islam Kontemporer Tentang Isu-Isu Global. Jakarta: Paramadina. 2001.
- Mufti, Muslim Dan Didah Durrotun Naafisah, *Teori-Teori Demokras*i, CV Pustaka Setia. Bandung. 2013.
- Rajasa, Sutan, Kamus Ilmiah Populer, Karya Utama Surabaya. Surabaya. 2002.

- Rayhandy, Yoss Ahmad, UUD 1945 (Undang-Undang Dasar 1945) dan GBHN (Garis-Garis Besar Haluan Negara) edisi lengkap 2009-2014. Citra media wacana. 2009.
- Suleman, Zulkifli, *Demokrasi Untuk Indonesia: Pemikiran Politik Bung Hatta*, Jakarta: Kompas.. 2010.
- Suryo, Sakti Hadiwijoyo, *Negara, Demokrasi Dan Civil Society*, Yogyakarta: Graha Ilmu.. 2012.
- Swasono, Sri-Edi, Bung Hatta: Bapak Kedaulatan Rakyat, Jakarta: Yayasan Hatta. 2002.
- Tempo, *Hatta*, Kepustakaan Populer Gramedia. Jakarta. 2010.
- Ubaedillah, A dan Abdul Rozak, *Pendidikan Kewarganegaraan (civic education) Demokrasi: Hak Asasi Manusia Dan Masyarakat Madani*, Uin Syarif Hidayatullah.. Jakarta: Kencana Penada Media Group. 2011 Edisi Ketiga
- Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an Departemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahnya Special For Women*, Sygma. Bandung. 2011.
- Zaini, Ahmad, Ilmu Politik, Fakultas Syari'ah Dan Ekonomi Islam IAIN SMH Banten 2013.
- "teori kedaulatan rakyat" https://id.Wikipedia.org/wiki/, (diakses pada 27 Agustus 2015, pukul 19.30 WIB)
- http://florentina-yasinta-jehanu-fisip14.web.unair.ac.id/artikel_detail-137106-SOH%20216-Moh.%20Hatta%20:%20Kedaulatan%20Rakyat%20.html. (Diakses pada 6 September 2015 pukul 12.04 WIB)
- http://dokumen.tips/documents/mohammad-hatta.html. (Diunduh pada 6 September 2015 pukul 12.14 WIB)